



No.Katalog : 4102004.91

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT

## 2011



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT**



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
PROVINSI PAPUA BARAT  
2011**

*WELFARE INDICATORS OF  
PAPUA BARAT PROVINCE  
2011*

ISSN :

No. Publikasi/*Publication Number* : 91522.1205

Katalog BPS/*BPS Catalogue* : 4102004.9100

Ukuran Buku/*Book Size* : 16,5 cm x 21 cm

Jumlah Halaman/*Total Pages* : xix + 77 halaman (96 halaman)

Naskah/*Manuscript* :

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit/*Cover Design* :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan Oleh/*Published by* :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat





## KATA PENGANTAR KEPALA BPS PROVINSI PAPUA BARAT

---

**Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2011** merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini merupakan terbitan keempat yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Provinsi Papua Barat. Perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola dan taraf konsumsi, perumahan, serta indikator sosial lainnya.

Data yang digunakan bersumber dari BPS. Semua indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang telah dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sejak tahun 2006 kecuali indikator ketenagakerjaan bersumber dari data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Manokwari, September 2012  
Kepala BPS Provinsi Papua Barat

Ir. Tanda Sirait,MM



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xiii
TINJAUAN UMUM	xv
I. KEPENDUDUKAN	1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
Persebaran dan Kepadatan Penduduk	2
Struktur Umur Penduduk	4
II. KESEHATAN	7
Angka Harapan Hidup	7
Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan	9
Imunisasi dan ASI	11
Morbiditas	14
III. PENDIDIKAN	17
Penduduk Usia Sekolah	18
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	18
Angka Partisipasi Murni (APM)	20
Angka Melek Huruf Dan Rata – Rata Lama Sekolah	23
Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	24

<b>IV. KETENAGAKERJAAN</b>	<b>27</b>
Struktur Penduduk Usia Kerja Agustus 2011	27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	29
TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	32
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha	32
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan	34
Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja	35
<b>V. TARAF DAN POLA KONSUMSI</b>	<b>37</b>
Perembangan Kemiskinan di Papua Barat, 2006 - 2011	37
Garis Kemiskinan Maret 2009 - Maret 2011	40
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2009 - 2011	41
Perkembangan Tingkat Kesejahteraan	42
Perkembangan Distribusi Pendapatan	43
Konsumsi Rumah Tangga	44
<b>VI. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN</b>	<b>47</b>
Kualitas Perumahan	49
Air Minum Layak	50
Sanitasi Layak	52
Penerangan	55

<b>VII. SOSIAL LAINNYA</b> _____	<b>56</b>
Program Penanggulangan Kemiskinan _____	56
Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi _____	58
Akses Internet _____	59
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> _____	<b>60</b>

<http://papuabarat.bps.go.id>



<http://papuabarat.bps.go.id>

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.1	Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2005–2011	4
Tabel 2.1	Cakupan Layanan Imunisasi Pada Bayi Berumur 12–23 Bulan di Provinsi Papua Barat Tahun 2011	12
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2011	29
Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2011	31
Tabel 4.3	Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2011	33
Tabel 4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009-2011	34
Tabel 4.5	Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009-2011	35
Tabel 5.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, 2006 - 2011	38

Tabel 5.2	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009–2011 _____	42
Tabel 5.3	Ukuran Tingkat Pemerataan Pendapatan di Provinsi Papua Barat Menurut Bank Dunia dan Koefisien Gini, Tahun 2007 - 2011 _____	45
Tabel 5.4	Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009 - 2011 _____	46
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Program Penanggulangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 _____	57

# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1	Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 _____	3
Gambar 1.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 _____	3
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Tahun 2006–2011 dan Target AHH Indonesia Tahun 2014 _____	8
Gambar 2.2	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2011 _____	9
Gambar 2.3	Penolong Kelahiran Balita di Papua Barat Tahun 2009 dan 2011 _____	10
Gambar 2.4	Persentase Balita 0–5 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif di Papua Barat Tahun 2009–2011 _____	13
Gambar 2.5	Angka Kesakitan Penduduk Papua Barat Tahun 2009–2011 _____	14
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7–24 Tahun di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008–2011 _____	19
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 _____	20
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008–2011 _____	21

Gambar 3.4	Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 _____	22
Gambar 3.5	Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat Tahun 2006–2011 _____	24
Gambar 3.6	Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 _____	25
Gambar 4.1	Struktur Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus Tahun 2011 _____	28
Gambar 5.1	Sebaran Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2010 _____	39
Gambar 5.2	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 _____	43
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 _____	48
Gambar 6.2	Kondisi Perumahan Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009 – 2011 _____	49
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008 – 2011 _____	51
Gambar 6.4	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 _____	52
Gambar 6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Sanitasi yang Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008 – 2011 _____	53

- Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011 \_\_\_\_\_ 54
- Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki PSTN, HP, PC dan Akses Internet di Provinsi Papua Barat Tahun 2006 - 2011 \_\_\_\_\_ 58

<http://papuabarat.bps.go.id>



<http://papuabarat.bps.go.id>

# DAFTAR TABEL LAMPIRAN

---

I (1)	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2000–2011 _____	61
I (2)	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008–2011 _____	62
II (1)	Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2009–2011 _____	63
II (2)	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011 __	64
II (3)	Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009–2011 _____	65
III (1)	Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009–2011 _____	66
III (2)	Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2010–2011 _____	67
III (3)	Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2010–2011 _____	68
V (1)	Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2009 dan 2010 _____	69
V (2)	Garis Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007–2011 __	70
V (3)	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007–2011 _____	71

V (4) Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, Tahun 2009–2011_____	72
VI (1) Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan di Papua Barat, Tahun 2010–2011 _____	73
VI (2) Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010–2011 _____	74
VI (3) Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010–2011 _____	75
VII (1) Prsentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi dan Teknologi di Provinsi Papua Barat Tahun 2010–2011_____	76
VII (2) Persentase Penduduk yang Mengakses Intenet di Provinsi Papua Barat Tahun 2011_____	77

# Tinjauan Umum

## Ruang Lingkup

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Papua Barat 2011 menyajikan gambaran mengenai perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat tahun 2011. Dimensi kesejahteraan rakyat sangat luas dan kompleks. Karena itu, taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat diukur melalui dimensi tertentu. Dalam publikasi ini, kesejahteraan rakyat diamati melalui berbagai aspek spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, perumahan dan aspek sosial lainnya. Permasalahan kesejahteraan rakyat diukur baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit

## Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Rakyat

Perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat hingga 2011 secara ringkas sebagai berikut:

### Di bidang kependudukan (demografis):

- Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2011 sebesar 789.013

jiwa terdiri dari 417.403 penduduk laki-laki dan 371.610 penduduk perempuan.

- Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010 sampai dengan 2011 sebesar 3,76 persen per tahun.
- Sebaran penduduk Papua Barat tidak merata. Separuh penduduk Papua Barat terpusat di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari.
- Kepadatan penduduk tertinggi di Papua Barat di Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Tambrauw.
- *Dependency ratio*, yaitu perbandingan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15–64 tahun), masih cukup besar yaitu 54,84.

#### **Di bidang kesehatan:**

- Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebesar 68,81 tahun.
- Angka harapan hidup tertinggi di Papua Barat pada tahun 2011 adalah di Kota Sorong yaitu 72,36 tahun dan terendah di Kabupaten Tambrauw yaitu 66,31 tahun.
- Cakupan imunisasi BCG, DPT, POLIO, CAMPAK, dan HEPATITIS B pada bayi 12–23 bulan di Provinsi Papua Barat tahun 2011 masing-masing sebesar 91,71 persen; 88,56 persen; 89,21 persen; 86,60 persen dan 85,52 persen.

- Angka kesakitan penduduk Papua Barat menurun dari 19,50 persen pada tahun 2010 menjadi 13,92 persen pada tahun 2011.

**Di bidang pendidikan:**

- Pada tahun 2011, terdapat 283.693 penduduk yang menjadi target pendidikan formal, terdiri dari 101.564 penduduk usia 7–12 tahun; 46.137 penduduk usia 13–15 tahun; 44.188 penduduk usia 16–18 tahun dan 91.804 penduduk usia 19–24 tahun.
- Angka partisipasi sekolah (APS) tahun 2011 untuk APS 7 – 12 tahun sebesar 94,38 persen; APS 13–15 tahun sebesar 88,59 persen; APS 16–18 tahun sebesar 65,40 persen dan APS 19–24 tahun sebesar 18,31 persen.
- Angka partisipasi murni tahun 2011 untuk APM SD sebesar 88,28 persen; APM SMP sebesar 57,66 persen; APM SMA sebesar 47,88 persen dan APM PT sebesar 13,86 persen.
- Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Papua Barat tahun 2010 sebagian besar masih rendah. Penduduk 10 tahun atau lebih yang tamat SD sebesar 22,81 persen sementara mereka yang menamatkan perguruan tinggi hanya 8,76 persen.

### **Di bidang ketenagakerjaan:**

- Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) berdasarkan hasil Sakernas 2011 diestimasi mencapai 522.211 jiwa.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2011 sebesar 70,78 persen dan lebih tinggi daripada TPAK tahun 2010 yaitu sebesar 69,29 persen.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2011 sebesar 8,94 persen dan lebih tinggi daripada TPT tahun 2010 yaitu sebesar 7,68 persen.
- Mayoritas penduduk yang bekerja pada tahun 2011 terserap di sektor pertanian. Penduduk Papua Barat yang bekerja di sektor pertanian sebesar 48,50 persen, di sektor industri 11,00 persen dan di sektor jasa sebesar 40,50 persen. Dibanding tahun 2010, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian berkurang sebaliknya di sektor jasa bertambah.

### **Taraf dan Pola Konsumsi**

- Jumlah dan persentase penduduk miskin di Papua Barat tahun 2011 sebesar 249.840 jiwa atau sebesar 31,92 persen.
- Rata-rata pengeluaran penduduk Papua Barat tahun 2011 sebesar 691.933 rupiah dan lebih tinggi daripada rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tahun 2010 yaitu sebesar 601.279 rupiah.

- Tingkat pemerataan pendapatan yang diukur dengan proxy pengeluaran pada tahun 2011 dengan menggunakan indeks *gini ratio* sebesar 0,39 yang bermakna ada ketimpangan pendapatan tetapi masih dalam status ketimpangan rendah.

#### **Di bidang perumahan**

- Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri pada tahun 2011 sebesar 67,23 persen lebih tinggi dari tahun 2010 yaitu sebesar 63,67 persen.
- Sebesar 42,56 persen rumah tangga di Papua Barat pada tahun 2011 telah mengakses air minum layak.
- Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2011 sebesar 45,26 persen.

#### **Sosial Lainnya**

- Akses penduduk terhadap program penanggulangan kemiskinan di Papua Barat tahun 2011 sebagai berikut: 34,64 persen mendapatkan layanan kesehatan gratis; 53,51 persen membeli beras miskin (*raskin*) dan 5,49 persen mengakses kredit untuk usaha.
- Penduduk Papua Barat yang menggunakan telepon selular (*handphone*) pada tahun 2011 sebesar 64,61 persen.
- Seiring dengan pesatnya pengguna telepon selular, penduduk Papua Barat yang mengakses internet pada tahun 2011 mencapai 10,13 persen.

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
PROVINSI PAPUA BARAT  
2011**

- Kependudukan
  - Kesehatan
  - Pendidikan
- Ketenagakerjaan
- Taraf dan Pola Konsumsi Rumah Tangga
- Perumahan dan Lingkungan
- Sosial Lainnya



# Bab 1

## Kependudukan

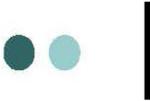
---

Pembahasan pada bab ini mencakup beberapa indikator penting kependudukan. Indikator penting kependudukan dimaksud antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk.

### Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 760.422 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2000 yaitu sebesar 529.689 jiwa, Provinsi Papua Barat selama tahun 2000–2010 mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 3,71 persen per tahun. Pada tahun 2011, penduduk di Provinsi Papua Barat diproyeksikan menjadi 789.013 jiwa (BPS Provinsi Papua Barat, 2012).

Dalam kurun waktu 10 tahun, penduduk Provinsi Papua Barat tumbuh cukup pesat. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama tahun 2000–2010 mencapai 3,71 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh lima proses: fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial (Bogue 1969: 1-2). Dari kelima proses tersebut, migrasi dan mobilitas sosial merupakan dua faktor dominan yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua



Barat. Pemekaran kabupaten induk yaitu Kabupaten Manokwari menjadi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Teluk Bintuni; Kabupaten Sorong menjadi Kabupaten Sorong, Kota Sorong (Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2000), Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat; dan Kabupaten Fakfak menjadi Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006) menjadi faktor penarik yang sangat kuat bagi kaum migran. Pada tahun 2010, terdapat 10 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat dengan tambahan dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.

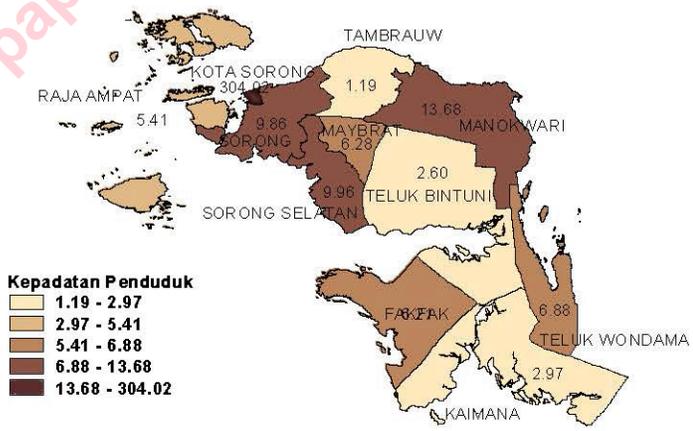
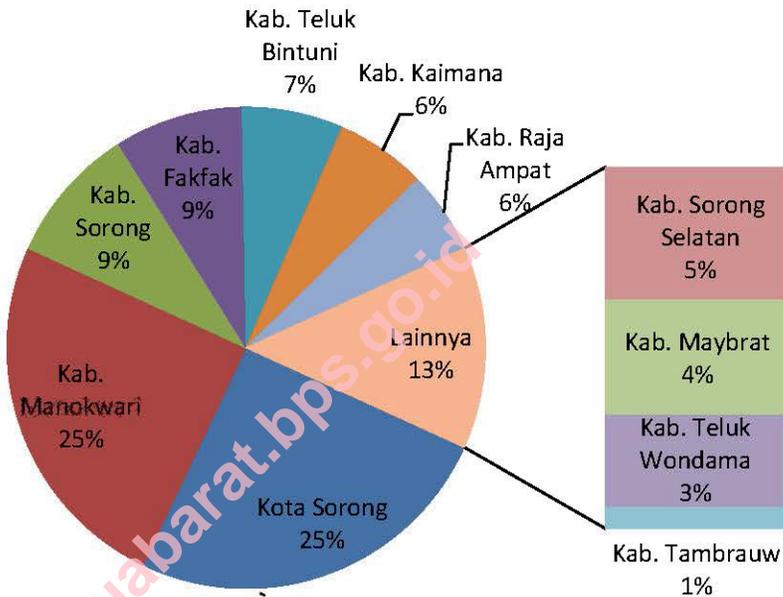
### **Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

Penduduk Provinsi Papua Barat tersebar tidak merata. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2011, satu di antara dua penduduk Provinsi Papua Barat tinggal di Kota Sorong atau di Kabupaten Manokwari. Separuh penduduk yang lain tersebar tidak merata di sembilan kabupaten lainnya dengan persentase kurang dari 10 persen (Gambar 1.1).

Sebaran penduduk yang tidak merata tersebut berdampak pada kepadatan penduduk yang juga tidak merata. Kota Sorong dengan luas wilayah hanya 0,68 persen dari luas Papua Barat dihuni oleh 25,30 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan 304 penduduk per Km<sup>2</sup>. Sebaliknya, Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas 21,48 persen dari luas Papua Barat dihuni oleh 6,87 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan hanya tiga jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tambrauw bahkan hanya satu jiwa per Km<sup>2</sup>.



**Gambar 1.1** Persebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011



**Gambar 1.2** Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011



## Struktur Umur Penduduk

Struktur penduduk memberikan gambaran bagaimana komposisi penduduk yang ada di Papua Barat menurut kelompok umur, jenis kelamin dan kombinasi antara kelompok umur dan jenis kelamin. Struktur penduduk menurut kelompok umur menginformasikan berapa sumberdaya manusia produktif dan yang tidak produktif yang ada di Provinsi Papua Barat. Selain itu, informasi ini juga sangat penting bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan publik karena pelayanan kebutuhan penduduk sangat bervariasi menurut umur.

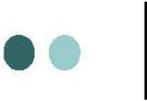
**Tabel 1.1 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Barat Tahun 2005–2011**

Tahun	0-14	15-64	65 +	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	33,33	65,31	1,35	53,11
2006	32,73	65,76	1,51	52,07
2007	32,00	66,49	1,51	50,39
2008	31,53	67,03	1,44	49,19
2009	31,08	67,39	1,53	48,40
2010*	34,16	64,20	1,65	55,77
2011**	33,58	64,58	1,84	54,84

Sumber: BPS (2007), Proyeksi Penduduk Indonesia Per Provinsi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

\* SP2010

\*\* Proyeksi Penduduk 2011



Dampak keberhasilan pengendalian penduduk tercermin dari perubahan struktur umur penduduk yang terlihat dari berkurangnya proporsi penduduk usia tidak produktif khususnya 0–14 tahun. Di sisi lain, proporsi penduduk usia produktif bertambah. Akibatnya, angka beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif berkurang.

Tingginya proporsi penduduk 0–14 tahun mengakibatkan tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Tabel 1.1 memperlihatkan angka beban ketergantungan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 masih cukup tinggi yaitu 54,84 persen. Artinya, di antara 100 penduduk usia produktif berumur 15–64 tahun, menanggung 54 sampai dengan 55 penduduk yang tidak produktif. Hingga tahun 2011, penduduk usia tidak produktif masih didominasi oleh kelompok anak-anak (0–14 tahun). Konsekuensinya adalah pendapatan dari penduduk usia produktif terserap pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan sarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah juga dibutuhkan pembangunan sarana kesehatan.



<http://papuabarat.bps.go.id>



## Bab 2

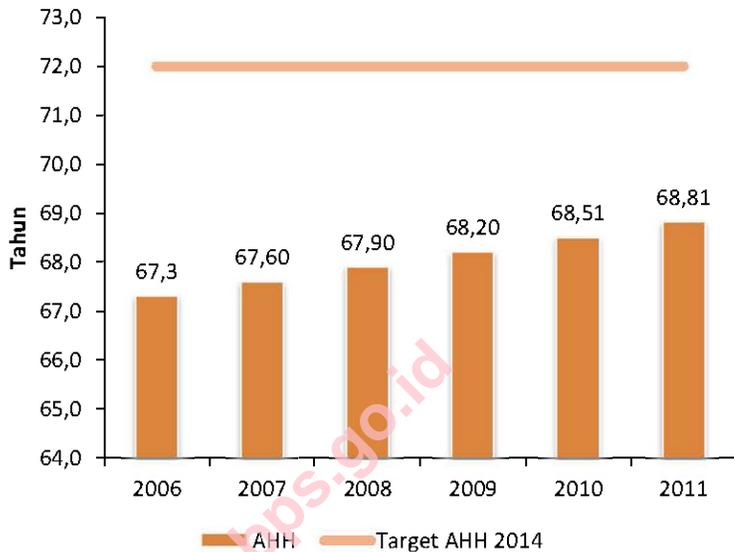
# Kesehatan

---

Kesehatan merupakan satu dari sebelas prioritas pembangunan nasional 2010–2014. Pada tahun 2014, angka harapan hidup di tingkat nasional ditargetkan menjadi 72,0 tahun; pemberian imunisasi dasar kepada 90 persen balita; penyediaan akses sumber air bersih menjangkau 67 persen penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas menjangkau 75 persen penduduk; penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran serta kematian bayi menjadi 24 per 1.000 kelahiran (Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN Tahun 2010–2014).

### **Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup Provinsi Papua Barat selama tahun 2006 hingga tahun 2011 menunjukkan peningkatan (Gambar 2.1). Angka harapan hidup pada tahun 2006 mencapai 67,3 tahun meningkat menjadi 68,81 tahun pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Meskipun angka harapan hidup mengalami peningkatan, AHH Provinsi Papua Barat hingga tahun 2011 belum melampaui target capaian AHH



**Gambar 2.1** Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Tahun 2006–2011 dan Target AHH Indonesia Tahun 2014

2014 yaitu sebesar 72 tahun. Diperlukan upaya ekstra keras oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mencapai target tersebut.

Hingga tahun 2011, masih ada perbedaan capaian angka harapan hidup antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Gambar 2.2 menunjukkan perbedaan tersebut. Angka harapan hidup tertinggi di Kota sorong mencapai 72,36 tahun, melebihi target AHH tahun 2014 dan terendah di Kabupaten Tambrauw yang hanya mencapai 66,31 tahun.

Perbedaan angka harapan hidup di tingkat kabupaten/kota di Papua Barat mengindikasikan perbedaan yang sangat nyata pada ketersediaan fasilitas kesehatan, akses pelayanan dasar di bidang kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai gambaran nyata, di Kota Sorong terdapat delapan



**Gambar 2.2 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011**

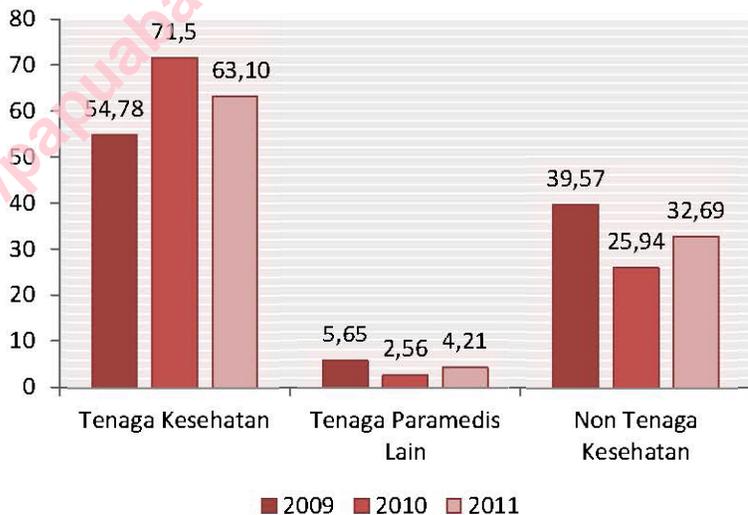
rumah sakit. Sebaliknya, belum ada satupun rumah sakit di Kabupaten Tambrau.

### **Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Kesehatan**

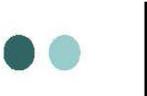
Peningkatan angka harapan hidup dapat diupayakan melalui pengurangan kasus kematian bayi. Semakin kecil jumlah kasus kematian bayi di suatu wilayah maka semakin lama harapan hidup penduduknya. Upaya pencegahan kematian bayi dimulai sejak bayi berada dalam kandungan melalui program *antinatal care*. Program *antinatal care* tersebut antara lain pemeriksaan minimal 4 kali selama masa kehamilan atau dikenal dengan istilah K-4, peningkatan akses masyarakat terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga

medis, layanan imunisasi lengkap kepada bayi berumur 12–23 bulan dan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Informasi *antinal care* yang dapat digali dari Susenas Kor adalah persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan (dokter dan bidan), imunisasi bayi berumur 12–23 bulan dan pemberian ASI eksklusif pada bayi berumur 0–5 bulan..

Gambar 2.3 memperlihatkan persentase balita (0–59 bulan) menurut penolong kelahiran pada tahun 2009 hingga tahun 2011. Pesentase penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan selama periode tersebut tampak fluktuatif tetapi menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun begitu, persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga non kesehatan masih cukup dominan. Di Kabupaten Raja Ampat sendiri, lebih dari separuh peristiwa kelahiran pada tahun 2011 masih ditolong oleh dukun. Perbedaan ketersediaan fasilitas



**Gambar 2.3 Penolong Kelahiran Balita di Papua Barat Tahun 2009–2011**



kesehatan tampaknya berdampak pada perbedaan akses penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan.

### **Imunisasi dan ASI**

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi dan mencegah dari penyakit agar anak tetap sehat.

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi berumur satu tahun adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak usia 0-2 bulan. Demikian juga untuk imunisasi Polio dan Hepatitis B untuk pertama kali. Imunisasi DPT dan Polio diberikan secara bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangnya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Pada kejadian luar biasa dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian.

Tabel 2.1 menunjukkan cakupan layanan imunisasi pada anak berumur 12–23 bulan. Susenas 2011 mencatat persentase bayi 12–23 bulan yang telah mendapat imunisasi BCG mencapai 91,71 persen. Di sisi lain TBC masih menjadi penyakit yang banyak diderita penduduk Papua Barat. Ditemukan 114 suspek TBC di Papua Barat pada tahun 2009 (Kemenkes RI, Laporan Subdit TB Kemenkes 2000–2010).

Berbeda dengan imunisasi BCG, capaian imunisasi Hepatitis B dan campak masih sangat rendah. Hingga tahun 2011,

**Tabel 2.1 Cakupan Layanan Imunisasi Pada Bayi Berumur 12 – 23 Bulan di Provinsi Papua Barat Tahun 2011**

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak	Hep. B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Fakfak	100,00	100,00	100,00	100,00	95,37
Kab. Kaimana	87,87	87,87	87,87	87,87	87,87
Kab. Teluk Wondama	69,79	51,15	62,75	62,80	55,84
Kab. Teluk Bintuni	88,40	92,22	95,97	90,82	81,59
Kab. Manokwari	83,86	78,98	81,78	78,90	83,41
Kab. Sorong Selatan	97,12	94,22	85,18	76,26	88,03
Kab. Sorong	100,00	100,00	96,71	96,71	96,71
Kab. Raja Ampat	92,56	92,56	95,06	92,58	90,04
Kab. Tambrau	66,78	66,75	66,81	55,69	55,65
Kab. Maybrat	100,00	100,00	100,00	100,00	70,58
Kota Sorong	97,35	92,72	91,73	89,13	88,43
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>91,71</b>	<b>88,56</b>	<b>89,21</b>	<b>86,60</b>	<b>85,52</b>

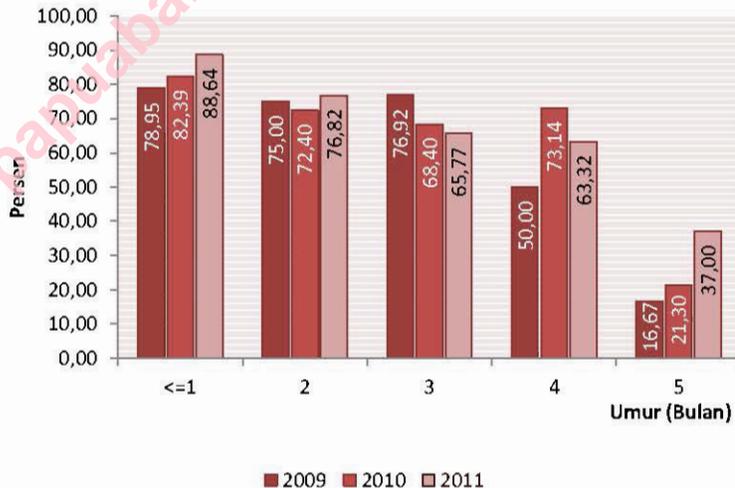
Sumber: BPS, Susenas 2011

capaian imunisasi campak baru 86,60 persen dan imunisasi Hepatitis B sebesar 85,52 persen.

Selain imunisasi, upaya meningkatkan ketahanan tubuh bayi adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan baik, menyusui merupakan cara memberi makan yang paling ideal untuk 4-6 bulan pertama sejak dilahirkan tanpa memberikan makanan tambahan, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi.

Bayi memperoleh ASI eksklusif apabila dalam enam bulan hanya diberikan ASI tanpa makanan tambahan. ASI eksklusif diyakini merupakan asupan terbaik bagi bayi yang tidak dapat digantikan oleh susu formula manapun. Keunggulan dan manfaat menyusui dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek gizi, aspek imunologik, aspek psikologi, aspek kecerdasan, neurologis, ekonomis dan aspek penundaan kehamilan (<http://www.f-buzz.com/2008/05/21/kelebihan-air-susu-ibu-asi-dan-manfaat-menyusui/>).

Gambar 2.4 menunjukkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi berumur 0–5 bulan di Provinsi Papua Barat selama tahun 2009 hingga tahun 2011. Secara umum, pemberian ASI eksklusif selama tahun 2009–2011 menunjukkan peningkatan. Pemberian ASI eksklusif tinggi pada umur satu

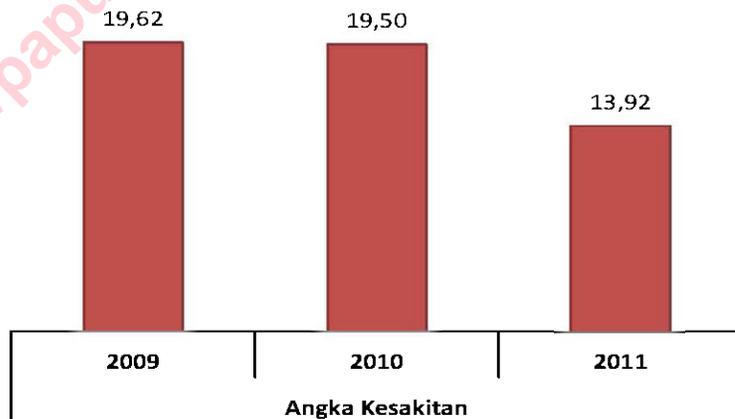


**Gambar 2.4**  
**Persentase Balita 0–5 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif di Papua Barat Tahun 2009–2011**

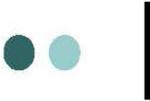
bulan atau kurang kemudian menurun pada bulan-bulan berikutnya. Persentase bayi berumur lima bulan yang mendapat ASI eksklusif meningkat dari 16,67 persen pada tahun 2009 menjadi 21,30 persen pada tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi 37,00 persen pada tahun 2011.

### Morbiditas

Daya tahan tubuh yang lemah mengakibatkan manusia mudah terserang penyakit. Salah satu indikatornya adalah morbiditas atau angka kesakitan. Angka kesakitan menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah atau mengerjakan pekerjaan rumah.



Gambar 2.5  
Angka Kesakitan Penduduk Papua Barat Tahun 2009–2011



Secara umum, angka kesakitan penduduk Papua Barat menurun dari 19,62 persen pada tahun 2009 menjadi 19,50 persen pada tahun 2010 dan 13,92 persen pada tahun 2011. Penurunan angka kesakitan tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan angka harapan hidup. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Angka kesakitan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan selengkapnya pada Lampiran II (1).

<http://papuabarat.bps.go.id>



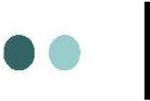


## Bab 3

# Pendidikan

---

Dalam RPJMN 2010 - 2014 disebutkan bahwa peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama. Sampai dengan akhir 2014, ada sembilan fokus pembangunan pendidikan yaitu: 1) peningkatan kualitas wajib belajar 9 tahun, 2) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, 3) Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, 4) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, 5) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal, 6) Peningkatan minat dan budaya gemar membaca aksara, 7) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, 8) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, dan 9) Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Sasaran yang hendak diwujudkan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dan penurunan angka buta huruf serta indikator lainnya di mana masing-masing target nasional pada tahun 2014 dapat dilihat pada Buku II Bab II RPJMN 2010 - 2014.



## **Penduduk Usia Sekolah**

Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi penduduk berusia 0–6 tahun, pendidikan dasar bagi penduduk usia 7–15 tahun, pendidikan menengah (16–18 tahun) dan pendidikan tinggi (19–24 tahun). Berdasarkan proyeksi penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2011, penduduk usia sekolah 0–24 tahun sebanyak 415.994 orang atau 52,72 persen dari jumlah penduduk Provinsi Papua Barat. Jumlah penduduk usia sekolah tersebut terdiri dari 216.012 laki-laki dan 199.982 perempuan. Jumlah penduduk 0–6 tahun sebanyak 132.301 orang, ini menjadi target Pendidikan Anak Usia Dini di Papua Barat. Sebanyak 283.693 sisanya merupakan target pendidikan formal yang terdiri dari 101.564 penduduk usia 7–12 tahun; 46.137 penduduk usia 13–15 tahun; 44.188 penduduk usia 16–18 tahun dan 91.804 penduduk usia 19–24 tahun.

## **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka partisipasi sekolah mengukur persentase penduduk usia sekolah yang masih bersekolah. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar. Berdasarkan Gambar 3.1, diperoleh bahwa pada tahun 2011 sebanyak 94,38 persen penduduk usia 7 - 12 tahun berstatus masih sekolah. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin jika dibandingkan dengan tahun 2010. APS untuk penduduk usia 16–18 tahun dan 19–24 tahun juga menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



**Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7–24 Tahun di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008–2011**

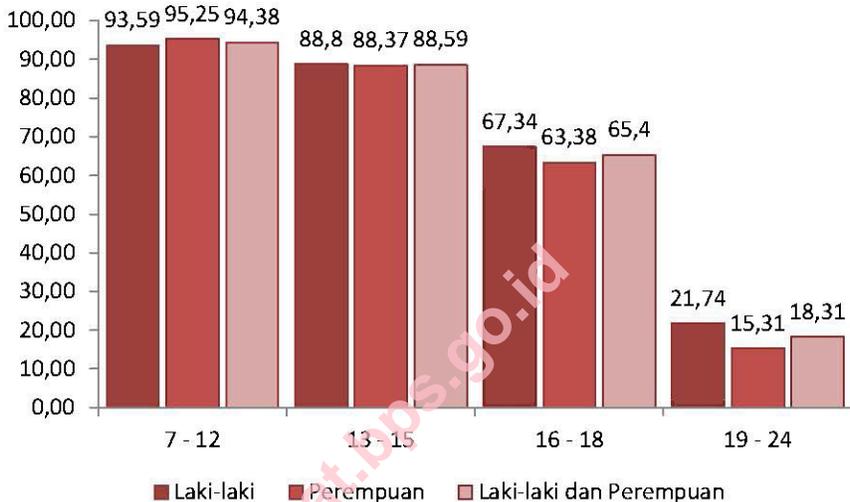


Perbedaan APS penduduk usia 7–15 tahun antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 tidak berbeda nyata. Perbedaan APS tampak nyata untuk penduduk usia 16–24 tahun. APS penduduk usia 7–12 tahun terendah di Kabupaten Teluk Wondama yaitu 87,76 persen. APS penduduk usia 13–15, 16–18 dan 19–24 tahun selengkapnya dapat diamati pada Lampiran III (2).

Selain terdapat perbedaan antar kabupaten/kota, APS juga berbeda menurut jenis kelamin. Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa pada kelompok umur 7–12 tahun, hampir tidak ada perbedaan partisipasi sekolah. Tetapi, pada kelompok umur 16–18 tahun, perbedaan partisipasi sekolah antara anak laki-laki dan perempuan tampak nyata. APS laki-laki pada kelompok umur 16–18 tahun lebih tinggi 3,96 poin daripada APS Perempuan.



**Gambar 3.2 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011**

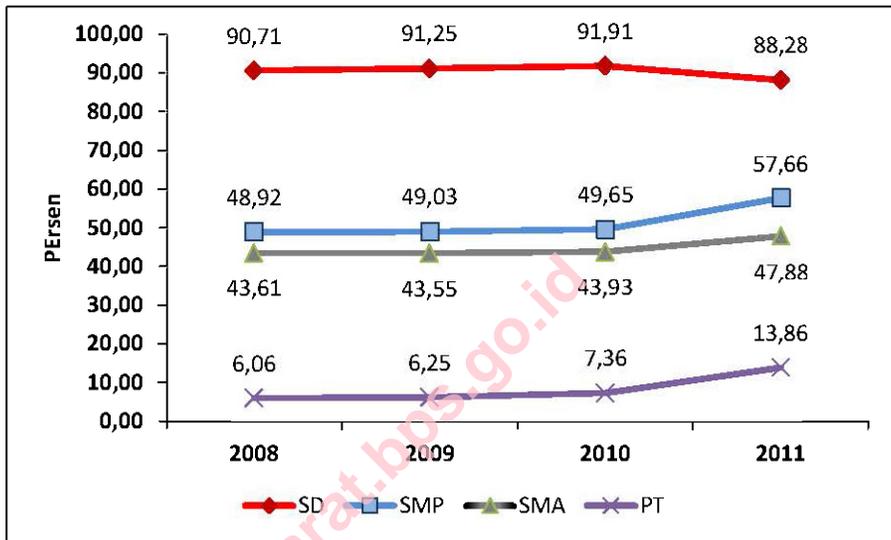


### Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan APS, angka partisipasi murni (APM) mengukur partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sebagai contoh, APM SD mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 7–12 tahun yang masih bersekolah SD/ sederajat, APM SMP mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 13–15 tahun yang masih bersekolah SMP/ sederajat, dan seterusnya. APM menurut jenjang pendidikan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2008 hingga 2011 dapat diamati pada Gambar 3.3.

Sekilas tampak bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah APM. Jika kita membandingkan APS sebagaimana tergambar pada Gambar 3.1 dan APM pada

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2011

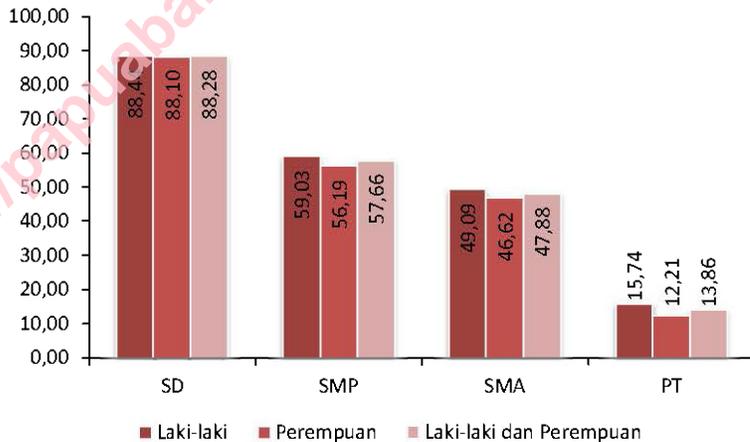


Gambar 3.3 maka selisih APS dan APM terbesar pada APS 13–15 tahun dan APM SMP/ sederajat yaitu 30,93 persen. Hal ini menandakan bahwa partisipasi sekolah penduduk 13–15 tahun cukup tinggi tetapi tidak pada jenjang yang seharusnya. Fenomena ini disebabkan oleh keterlambatan anak bersekolah.

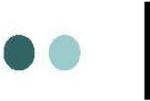
Dikaitkan dengan target Pendidikan Untuk Semua-PUS (*Education for All-EFA*) di mana pada tahun 2015, semua anak mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan yang bermutu. Target nasional PUS adalah 100 persen APM pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk capaian APM SD, Provinsi Papua Barat optimis dapat mencapai target nasional PUS tersebut hingga tahun 2015 tetapi tidak untuk APM SMP dan SMA. Target nasional PUS untuk APM SMP dan SMA akan tercapai jika dalam tiga tahun dari sekarang terjadi

penambahan gedung sekolah SMP dan SMA dan fasilitasnya serta penambahan guru yang tersebar hingga ke daerah terisolir sekalipun.

Dengan demikian, peningkatan capaian APM SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat menjadi isu strategis pembangunan pendidikan di Papua Barat. Lampiran III (3) memperlihatkan capaian APM di tingkat kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan. capaian APM SMP/ sederajat masih rendah dan terdapat perbedaan capaian antar wilayah yang cukup tinggi. Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Raja Ampat adalah tiga kabupaten dengan capaian APM SMP/ sederajat kurang dari 45 persen. Sebaliknya, Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Maybrat adalah tiga kabupaten dengan capaian APM SMP



**Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011**



lebih dari 60 persen.

Gambar 3.4 selanjutnya menunjukkan perbedaan APM antara anak laki-laki dan perempuan di jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Perbedaan APM di tingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tidak terlalu nyata tetapi perbedaan APM di tingkat SMA/ sederajat tampak nyata.

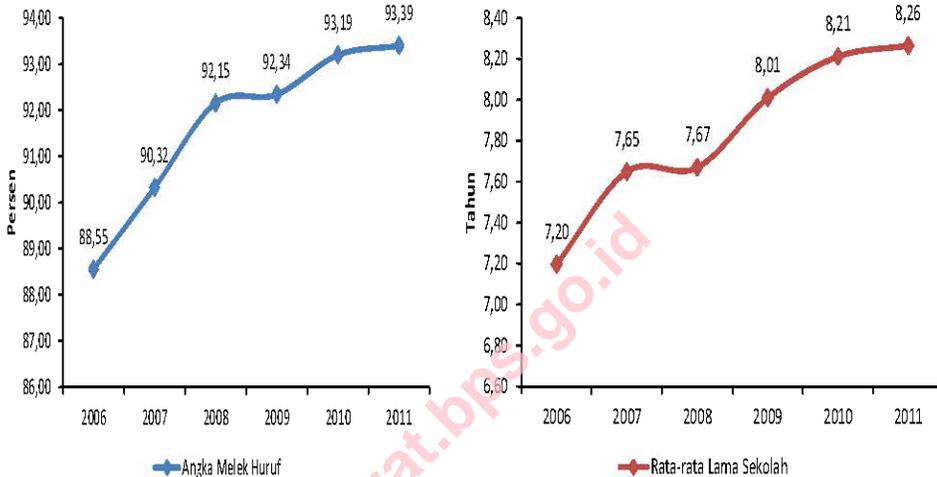
### **Angka Melek Huruf Dan Rata – Rata Lama Sekolah**

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah merupakan dua indikator yang dijadikan sebagai komponen untuk mengukur pembangunan manusia dari aspek pendidikan. Angka melek huruf menunjukkan persentase penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis huruf. Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk bersekolah.

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa, penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami kenaikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf meningkat dari 88,55 persen pada tahun 2006 menjadi 92,15 persen pada tahun 2008 dan menjadi 93,39 persen pada tahun 2011. Rata – rata lama sekolah penduduk Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan (dari 7,20 tahun di tahun 2006 menjadi 8,01 tahun pada tahun 2009 dan 8,26 tahun pada tahun 2011).

Kenaikan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah ini berdampak nyata pada peningkatan IPM Provinsi Papua Barat. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2011 mencapai 69,65 dan menempati peringkat ke-29 dari 33 provinsi se-Indonesia.

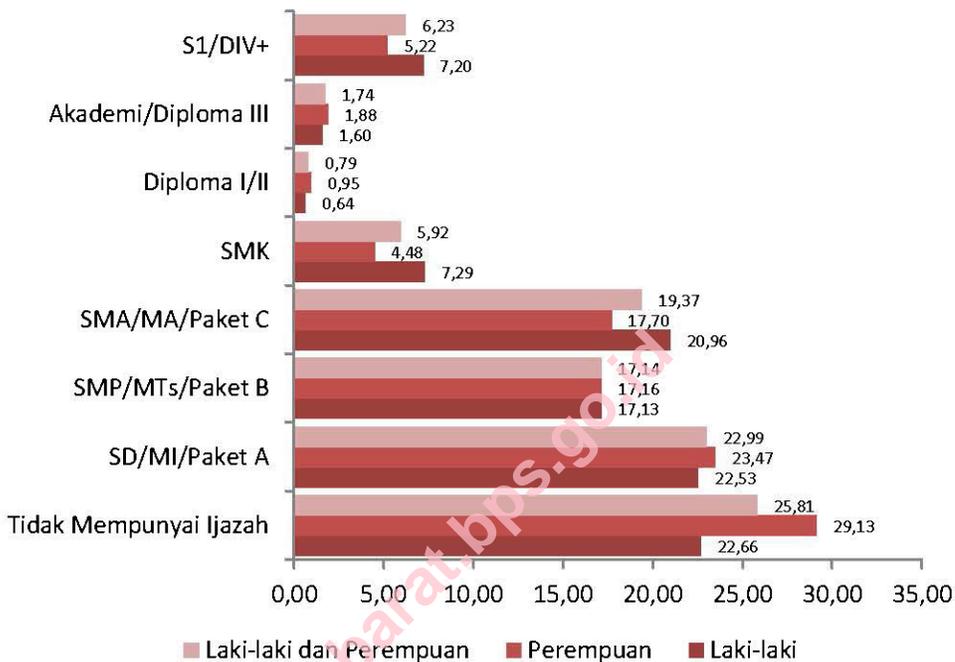
**Gambar 3.5 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2011**



### Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Kualitas pendidikan masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkatan ijazah terakhir yang dicapai. Dalam kehidupan nyata, ukuran kualitas pendidikan seseorang paling mudah dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Gambar 3.6 memberikan gambaran tentang pencapaian pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2011. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah SD dan yang telah menamatkan SD mencapai 25,81 persen dan 22,99 persen. Jika diakumulasikan hingga tamatan SMP, maka persentasenya menjadi 65,94 persen.

Masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan berdampak nyata pada kualitas tenaga kerja yang ada. Uraian



**Gambar 3.6** Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun atau Lebih Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2011

ketenagakerjaan pada Bab 4 memaparkan dampak nyata rendahnya kualitas pendidikan pekerja di Papua Barat yang banyak terserap di sektor pertanian dan di sektor informal. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan akan memperbaiki kualitas ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat.



<http://papuabarat.bps.go.id>



## Bab 4

# Ketenagakerjaan

---

Pemerintah Indonesia menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada akhir 2014 berkisar antara lima dan enam persen. Untuk Provinsi Papua Barat sendiri, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan mencapai 5,1–5,6 persen pada tahun 2014. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi setidaknya tujuh persen pada 2010–2014 (Bappenas, 2010).

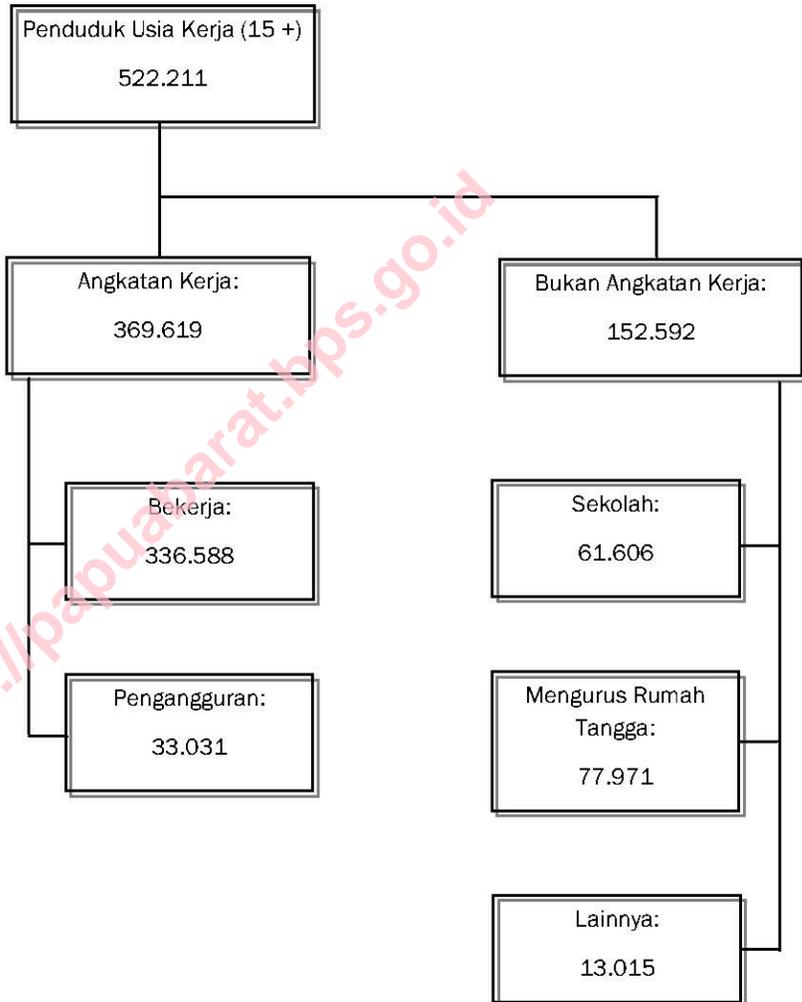
### **Struktur Penduduk Usia Kerja Agustus 2011**

Estimasi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011 sebanyak 522.211 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja sebesar 70,78 persen. Jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja sebesar 91,06 persen. Dengan kata lain, sekitar 8,94 persen penduduk angkatan kerja termasuk sebagai kelompok pengangguran terbuka. Struktur penduduk usia kerja selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Uraian selanjutnya memaparkan beberapa indikator ketenagakerjaan mulai dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT) serta karakteristik



Gambar 4.1 Struktur Penduduk Usia Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus Tahun 2011



penduduk yang bekerja. Karakteristik penduduk yang bekerja dibedakan menurut lapangan usaha, pendidikan dan waktu bekerja.

### Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

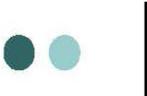
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran dengan jumlah penduduk usia kerja (persen). Perkembangan TPAK selama tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan. Selain itu, penduduk usia kerja yang masuk dalam pasar kerja sedikit berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan sedikit tambahan penduduk angkatan kerja yang tidak terserap oleh dunia kerja.

Jika ingin dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan, TPAK pedesaan lebih besar dibandingkan TPAK perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah akses pendidikan di pedesaan lebih sulit daripada di perkotaan. Akibatnya, penduduk usia sekolah di pedesaan lebih banyak tergolong

**Tabel 4.1** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2011

Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Agustus)				Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan	59,27	61,80	61,04	72,31	15,72	14,91	14,57	18,64
Pedesaan	72,06	71,49	73,49	67,21	4,72	4,75	4,77	5,08
Total	68,15	68,52	69,29	70,78	7,65	7,56	7,68	8,94

Sumber: BPS, Sakernas 2007–2010



sebagai penduduk angkatan kerja dan sebaliknya di perkotaan banyak yang termasuk bukan angkatan kerja. Selain itu, banyak angkatan kerja di perdesaan tergolong sebagai pekerja meskipun dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

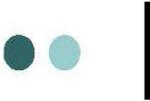
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Mereka yang tergolong pengangguran yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha, dan mereka yang sementara belum mulai kerja walau sudah mendapat pekerjaan dan mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak angkatan kerja yang berstatus pengangguran, maka semakin tinggi TPT.

Salama tahun 2008 hingga 2011 terlihat bahwa penurunan TPT tidak stabil. TPT tahun 2011 mencapai 8,94 persen lebih tinggi daripada TPT tahun 2008–2010 yang mencapai 7,65 persen, 7,56 persen dan 7,68 persen. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan di mana TPT perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan TPT Perdesaan. Lapangan pekerjaan di perdesaan sangat mudah dimasuki angkatan kerja khususnya di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dll yang tidak menuntut kualifikasi pendidikan tinggi. Tidak sama halnya dengan sektor – sektor modern di perkotaan seperti industri, jasa-jasa dan lain-lain yang menuntut kualifikasi pendidikan jauh lebih tinggi. TPT di perdesaan pada tahun 2008 sebesar 4,72 persen naik menjadi menjadi 5,08 persen pada tahun 2011. TPT perkotaan juga mengalami kenaikan dari 15,72 persen pada tahun 2008 menjadi 18,64 persen pada tahun 2011.

**Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009-2011**

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Perkotaan			Perdesaan			Kota + Desa		
	2009 (2)	2010 (3)	2011 (4)	2009 (5)	2010 (6)	2011 (7)	2009 (8)	2010 (9)	2011 (10)
TDK/BLM SEKOLAH	0,00	16,27	30,99	0,00	0,15	1,121	0,00	0,96	3,49
TDK/BLM TAMAT SD	10,55	4,28	7,42	2,38	3,20	2,538	3,08	3,44	3,50
SD	9,39	8,96	7,44	1,81	2,36	2,058	3,00	3,13	2,91
SLTP	13,09	5,76	11,77	4,87	4,47	5,615	7,02	4,86	7,50
SLTA UMUM/SMU	16,75	20,34	24,08	11,63	11,09	10,137	14,27	15,70	15,51
SLTA KEJURUAN/SMK	21,32	16,31	17,05	10,33	8,46	5,649	16,30	13,02	10,94
DIPLOMA I/II dan AKADEMI	10,15	20,33	17,78	4,76	13,59	5,951	7,21	17,27	10,38
UNIVERSITAS	13,03	18,17	35,52	7,25	16,14	13,591	10,90	17,31	23,13
<b>Total</b>	<b>14,91</b>	<b>14,57</b>	<b>18,64</b>	<b>3,93</b>	<b>4,77</b>	<b>5,08</b>	<b>6,97</b>	<b>7,68</b>	<b>8,94</b>

Sumber: BPS, Sakernas 2009–2011



## TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar TPT. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa TPT dari angkatan kerja dengan pendidikan SMP ke bawah lebih rendah daripada TPT dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan minimal SMA baik pada tahun 2009, tahun 2010 maupun tahun 2011. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah jauh lebih mudah terserap dalam lapangan pekerjaan daripada mereka yang berpendidikan tinggi.

Lebih ekstrim lagi jika TPT per tingkat pendidikan dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Semakin jelas bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap angkatan kerja di perkotaan tidak sekuat di perdesaan. Angkatan kerja berpendidikan rendah (SD ke bawah) yang terserap di perdesaan nyaris tiga kali lebih banyak yang di perkotaan.

## Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Gambaran ketenagakerjaan berdasarkan sektor/lapangan usaha dari tahun 2008 – 2011 menjelaskan terjadinya pergeseran struktur lapangan pekerjaan di Papua Barat. Sektor pertanian semakin menurun karena semakin ditinggalkan angkatan kerja yang lebih memilih sektor Industri (*manufacture*) dan Jasa-jasa (*services*). Persentase angkatan kerja yang bekerja pada kedua sektor terakhir semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ciri-ciri terjadinya urbanisasi ketika sektor modern semakin diminati para pencari kerja. Selama pertanian terus menjadi sektor yang subsisten dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sektor

lain maka pertanian akan semakin ditinggalkan. Mereka yang memasuki sektor pertanian adalah mereka yang tidak punya kesempatan masuk ke sektor industri dan jasa-jasa dan kalah bersaing dengan pencari kerja lain yang lebih berkualitas.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2011**

Daerah	Lapangan Usaha		
	Pertanian	Industri	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan</b>			
2008	10,16	20,81	69,03
2009	11,95	17,95	70,10
2010	9,52	19,93	70,55
2011	9,60	16,80	73,60
<b>Perdesaan</b>			
2008	74,39	7,84	17,77
2009	70,43	9,64	19,94
2010	70,93	7,98	21,09
2011	61,70	9,00	29,30
<b>Kota + Desa</b>			
2008	58,79	10,99	30,22
2009	55,68	11,73	32,59
2010	54,04	11,27	34,69
2011	48,50	11,00	40,50

Sumber: BPS, Sakernas 2007–2010

Namun perlu diperhatikan juga bahwa mayoritas penduduk yang bekerja terserap di sektor pertanian. Meskipun begitu sumbangan pertanian terhadap perekonomian Papua Barat jauh lebih kecil dibandingkan Industri dan jasa-jasa.

### Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Salah satu pengelompokkan status pekerjaan utama adalah dengan mengelompokkan pekerja ke dalam sektor informal atau formal. Pekerja di sektor informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar atau pekerja keluarga, pekerja bebas, atau pekerja keluarga. Pekerja di sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Secara umum terlihat bahwa pekerja di Papua Barat lebih dominan bekerja di sektor informal. Persentase pekerja di sektor informal mencapai 61,79 persen (Tabel 4.4). Pada

**Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009-2011**

Status Pekerjaan	Perkotaan			Perdesaan			Kota + Desa		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Formal	42,41	64,69	43,89	19,01	20,44	32,11	28,38	32,61	38,21
Informal	57,59	35,31	56,11	80,99	79,56	67,89	71,62	67,39	61,79

Sumber: BPS, Sakernas 2009–2011

tahun 2011, terdapat lonjakan pekerja di sektor formal yang signifikan dari 32,61 persen pada tahun 2010 menjadi 38,21 persen pada tahun 2011. Lonjakan pekerja di sektor formal ini disebabkan adanya kenaikan pekerja di sektor formal di daerah pedesaan dari 20,44 persen pada tahun 2010 menjadi 32,11 persen pada tahun 2011. Sebaliknya, pekerja di sektor formal di daerah perkotaan turun dari 64,69 persen menjadi 43,89 persen pada periode yang sama.

### Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Informasi persentase pekerja berdasarkan jam kerja disajikan pada Tabel 4.5. Persentase yang bekerja di bawah jam kerja normal turun dari 35,58 persen pada tahun 2010 menjadi 32,67 persen pada tahun 2011. Penurunan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Demikian juga dengan persentase pekerja yang bekerja kurang dari 15 jam selama seminggu mengalami penurunan pada periode yang sama.

**Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun atau Lebih Yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009-2011**

Daerah Tempat Tinggal	Jam Kerja					
	< 15 jam			< 35 jam		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	3,97	6,03	3,70	19,91	20,51	17,71
Perdesaan	6,17	5,97	4,00	41,31	41,30	37,72
Perkotaan + Perdesaan	5,62	5,98	3,93	35,91	35,58	32,67

Sumber: BPS, Sakernas 2009–2011



<http://papuabarat.bps.go.id>



## Bab 5

# Taraf dan Pola Konsumsi

---

Agenda pokok keempat pembangunan Papua Barat adalah penanggulangan kemiskinan. Penurunan persentase penduduk miskin dapat dimaknai adanya peningkatan tingkat pendapatan penduduk yang juga menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraannya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah peningkatan tingkat pendapatan tersebut telah dinikmati oleh semua penduduk secara merata atau hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Pembahasan bab ini mengulas jawaban permasalahan tersebut dengan mengkaji bagaimana taraf dan pola konsumsi sebagai proksi dari taraf dan pola pendapatan penduduk Papua Barat.

### **Perkembangan Kemiskinan di Papua Barat, 2006 - 2011**

Selama periode tahun 2006 – 2011, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat menunjukkan tren menurun. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada tahun 2006 sebanyak 284.100 jiwa (41,34 persen) turun menjadi 249.840 jiwa (31,92 persen) pada tahun 2011.

Penurunan angka kemiskinan Provinsi Papua Barat selama tahun 2006 – 2011 sejalan dengan penurunan angka

**Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Daerah, 2006 – 2011**

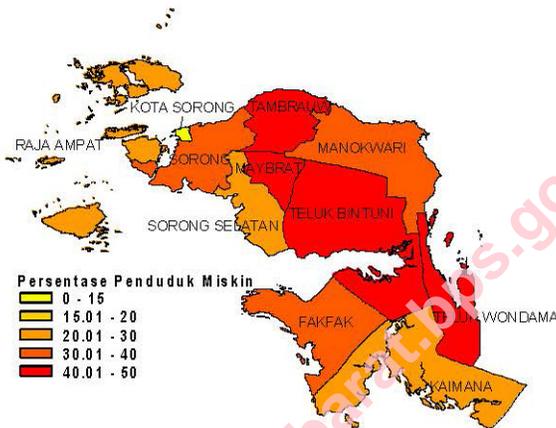
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+ Desa	Kota	Desa	Kota+ Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006	13,3	270,80	284,10	8,42	51,17	41,34
2007	11,0	255,80	266,80	7,14	48,82	39,31
2008	9,48	237,02	246,50	5,93	43,74	35,12
2009	8,55	248,29	256,84	5,22	44,71	35,71
2010	9,59	246,66	256,25	5,73	43,48	34,88
2011	10,78	239,06	249,84	6,05	39,56	31,92

Sumber: BPS, 2006–2011

kemiskinan di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2006 tercatat 270.800 jiwa (51,17 persen) turun menjadi 239.060 jiwa (39,56 persen) pada tahun 2011. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi daripada penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat.

Di sisi lain, jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan selama tahun 2006 – 2011 berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin di perkotaan turun selama periode tahun 2006–2009 dan meningkat kembali pada periode tahun 2009–2011. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perkotaan. Fluktuasi jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan menggambarkan kondisi kemiskinan di perkotaan memasuki fase *hardrock* yang ditandai dengan sulitnya tingkat kemiskinan untuk turun bahkan berpotensi untuk naik kembali.

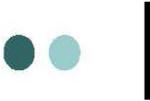
Masalah lain dari penanggulangan kemiskinan di Papua Barat adalah perbedaan persentase penduduk miskin antar kabupaten kota yang terlalu besar. Gambar 5.1 memetakan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2010. Zona kuning menunjukkan



**Gambar 5.1 Sebaran Penduduk Miskin di Papua Barat Tahun 2010.**

persentase penduduk miskin kurang dari 15 persen. Zona merah menunjukkan keadaan sebaliknya. Tampak bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Raja Ampat masing-masing sebesar 20,79 persen dan 23,62 persen. Persentase penduduk miskin di Kota Sorong kurang dari 15 persen.

Kemiskinan di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni serta dua kabupaten baru, Kabupaten Tambora dan Maybrat cukup tinggi sehingga membutuhkan kerja ekstra yang sangat berat untuk penanggulangannya. Keempat kabupaten ini terbilang cukup berat insiden kemiskinannya dengan persentase penduduk miskin lebih dari 40 persen. Keempat wilayah ini terbilang cukup terisolir. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dalam pengadaan kebutuhan barang dan jasa yang berakibat pada tingginya tingkat kemahalan di keempat kabupaten tersebut.

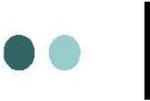


## Garis Kemiskinan Maret 2009 - Maret 2011

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kenaikan garis kemiskinan yang tidak diikuti peningkatan kemampuan daya beli berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebesar 318.796 rupiah per kapita per bulan terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar 254.759 rupiah dan garis kemiskinan non makanan sebesar 64.036 rupiah. Kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan 79,91 persen (Lampiran V (2)).

Dibanding tahun 2010, garis kemiskinan Provinsi Papua Barat tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 8,17 persen. Kenaikan garis kemiskinan di perkotaan, yaitu 7,58 persen pada tahun 2011, lebih rendah daripada kenaikan garis kemiskinan di perdesaan yaitu sebesar 8,43 persen. Sebagai pembandingan, inflasi year on year pada Maret 2011 tercatat 4,89 persen.

Kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan diduga disebabkan oleh kenaikan tingkat pengangguran. Walaupun inflasi y-o-y Maret 2010 di Papua Barat kurang dari lima persen tetapi pada Februari 2010, Papua Barat mengalami kenaikan angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Papua Barat pada Februari 2011 sebesar 8,28 persen lebih tinggi dari TPT Februari 2010 (7,77 persen). Kenaikan angka pengangguran Februari 2011 berdampak nyata pada penurunan daya beli masyarakat di perkotaan sehingga tidak mampu mengatasi kenaikan garis kemiskinan perkotaan.



Di sisi lain, meskipun garis kemiskinan perdesaan mengalami kenaikan sebesar 8,43 persen tetapi Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2011 tercatat 102,37. Artinya, indeks yang diterima lebih tinggi daripada indeks yang dibayarkan petani. NTP Subsektor Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan masing-masing sebesar 104,94; 126,18; 112,54; dan 111,46. Hanya NTP Subsektor Tanaman Pangan yang nilai NTP-nya kurang dari 100 yaitu 86,66. Hal ini pertanda bahwa kenaikan pendapatan petani dinikmati oleh sebagian besar petani. Karena itu, kenaikan garis kemiskinan perdesaan masih dapat diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat perdesaan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di perdesaan mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

### **Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2009 - 2011**

Meskipun angka kemiskinan di Papua Barat selama periode Maret 2009 – Maret 2010 turun tetapi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik. Kenaikan nilai P1 dan P2 terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan (Lampiran V (3)).

Kenaikan nilai P1 dan P2 dapat dimaknai kondisi kemiskinan di Papua Barat semakin dalam dan semakin parah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Barat sebaiknya memprioritaskan program-program pembangunan yang pro penduduk miskin (*pro poor policy*). Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan

penduduk miskin dan mengurangi pengeluaran penduduk miskin dalam hal kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.

### Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Selaras dengan penurunan penduduk miskin selama periode tahun 2009–2011, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk per bulan meningkat. Jika pada tahun 2009, setiap penduduk mengeluarkan 552.162 rupiah untuk kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan dalam satu bulan maka pada tahun 2010 meningkat menjadi 601.279 rupiah dan pada tahun 2011 menjadi 691.933 rupiah atau mengalami peningkatan 15,08 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengeluaran perkapita ini dipicu oleh peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di samping kenaikan harga-harga.

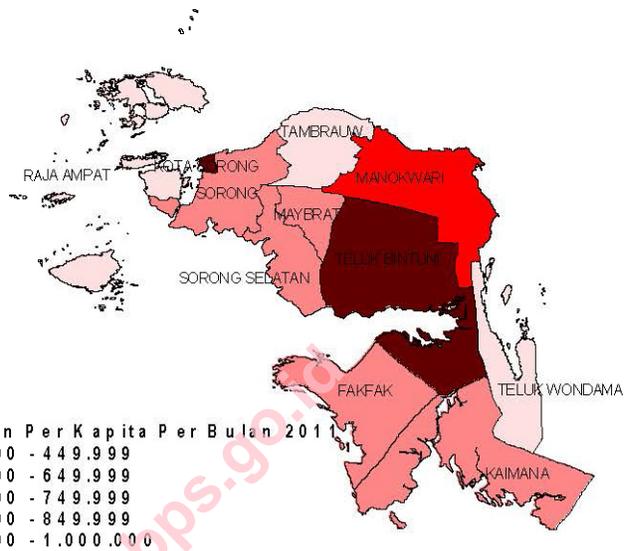
Gambar 5.2 memperlihatkan pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2011. Tampak bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan

**Tabel 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009–2011**

Tahun	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan	Kenaikan Nominal Per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
2009	552.162,22	
2010	601.279,39	8,90
2011	691.933,35	15,08

tertinggi di Kota Sorong. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrau kurang dari 450.000 rupiah.

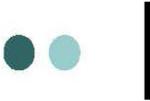
Sumber: BPS, Susenas 2006–2010



**Gambar 5.2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011**

**Perkembangan Distribusi Pendapatan**

Di samping meningkatkan tingkat pendapatan, penanggulangan kemiskinan juga perlu memperhatikan perkembangan distribusi pendapatan di antara strata ekonomi. Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan adalah Koefisien Gini dan Tingkat Kemerataan Menurut Bank Dunia. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai koefisien gini antara nol, untuk pemerataan sempurna dan satu, untuk ketimpangan parah.



Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Apabila persentasenya kurang dari 12 persen maka termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi; antara 12–17 persen kategori ketimpangan sedang; dan lebih dari 17 persen kategori ketimpangan rendah.

Tabel 5.3 menyajikan kedua ukuran ketimpangan pendapatan. Koefisien gini pada tahun 2007 sebesar 0,33 naik menjadi 0,35 pada tahun 2009 dan pada tahun 2011 menjadi 0,39. Meskipun terjadi kenaikan koefisien gini namun status ketimpangan pendapatan masih pada posisi di antara ketimpangan rendah. Dilihat dari tingkat pemerataan menurut Bank Dunia, Provinsi Papua Barat masih dalam kategori ketimpangan rendah. Proporsi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk masih di atas 17 persen selama periode 2007–2011.

### **Konsumsi Rumah Tangga**

Pola konsumsi rumah tangga memberikan gambaran dominasi pengeluaran rumah tangga. Apabila konsumsi rumah tangga didominasi untuk komoditi makanan maka rumah tangga tersebut memiliki sedikit bujet untuk pendidikan dan kesehatan. Besaran proporsi konsumsi makanan dapat

Tabel 5.3 Ukuran Tingkat Pemerataan Pendapatan di Provinsi Papua Barat Menurut Bank Dunia dan Koefisien Gini, Tahun 2007 – 2011

Tahun	Tingkat Kemerataan Menurut Bank Dunia			Gini Ratio
	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	28.29	44.59	27.13	0.33
2008	29.61	43.09	27.30	0.36
2009	22.75	41.11	36.14	0.35
2010	19,14	37,70	43,15	0,37
2011	18,76	38,24	43,00	0,39

Sumber: BPS, Susenas 2007–2011

digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin (Koefisien Engel).

Meskipun proporsi konsumsi rumah tangga terhadap komoditi makanan masih cukup dominan tetapi persentasenya menunjukkan penurunan selama tahun 2009–2011. Tabel 5.4 memperlihatkan pada tahun 2009 proporsi konsumsi makanan oleh penduduk Papua Barat sebesar 55,84 persen tetapi pada tahun 2011 persentasenya berkurang menjadi 50,19 persen. Di sisi lain, proporsi konsumsi non makanan meningkat dari 44,06 persen pada tahun 2009 menjadi 49,81 persen pada tahun 2011. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan proporsi konsumsi non makanan adalah peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Sebagian beban biaya pendidikan ini khususnya di tingkat SD dan SMP telah dibebaskan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan besarnya menjadi

**Tabel 5.4 Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009 – 2011**

Kabupaten/Kota	Makanan			Non Makanan		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	65,70	55,81	53,05	34,30	44,19	46,95
Kaimana	63,96	59,80	60,63	36,04	40,20	39,37
Teluk Wondama	64,60	56,95	68,55	35,40	43,05	31,45
Teluk Bintuni	66,90	51,04	50,53	33,10	48,96	49,47
Manokwari	48,75	43,12	45,26	51,25	56,88	54,74
Sorong Selatan	67,26	42,41	52,77	32,74	57,59	47,23
Sorong	60,57	46,44	57,32	39,43	53,56	42,68
Raja Ampat	71,59	54,50	65,60	28,41	45,50	34,40
Tambrauw		64,23	70,38		35,77	29,62
Maybrat		52,71	64,57		47,29	35,43
Kota Sorong	51,09	46,10	46,14	48,91	53,90	53,86
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>55,84</b>	<b>47,67</b>	<b>50,19</b>	<b>44,06</b>	<b>52,33</b>	<b>49,81</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009–2011

sumber penerimaan rumah tangga berupa penerimaan transfer sekaligus menjadi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan. Demikian juga dengan biaya kesehatan, pengobatan di tingkat puskesmas di telah digratiskan telah mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan.



## Bab 6

# Perumahan dan Lingkungan

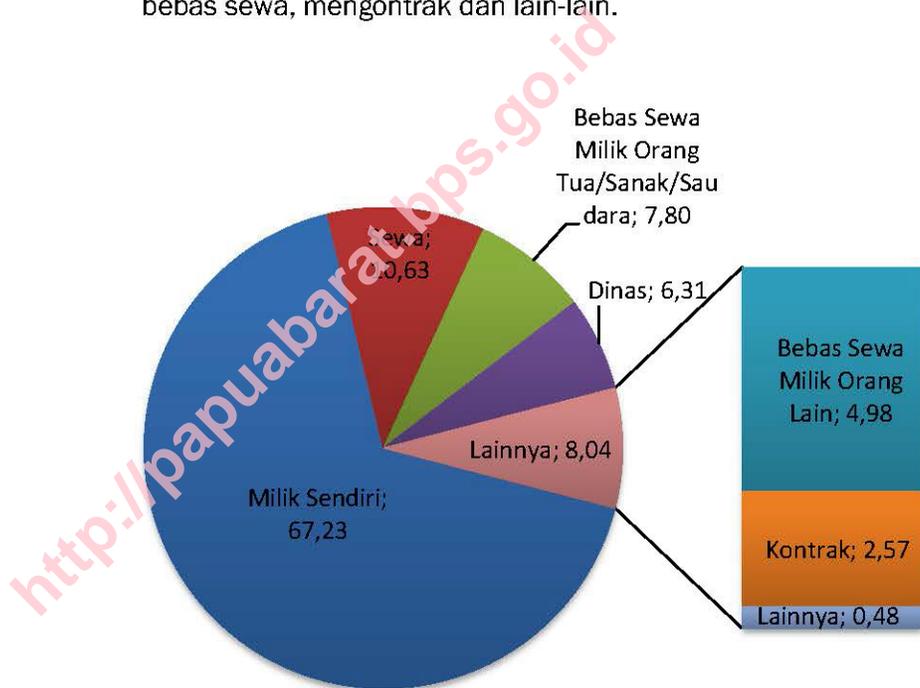
---

Hak warga negara untuk bertempat tinggal telah diatur baik dalam UUD 1945 maupun undang-undang. UUD 1945 Pasal 28H menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Bab III Perumahan Pasal 5 selanjutnya menegaskan bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur.” Dengan demikian, hak bertempat tinggal bagi warga negara sesungguhnya telah dinaungi payung hukum yang paling tinggi.

Idealnya, negara wajib memenuhi hak warga negaranya untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur. Namun, karena kecepatan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi belum dapat diimbangi oleh kemampuan penyediaan perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai maka belum semua penduduk memiliki rumah sendiri.



Susenas 2011 menunjukkan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri meningkat dibandingkan tahun 2010. Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sendiri pada tahun 2011 sebesar 67,23 persen lebih tinggi dari tahun 2010 yaitu sebesar 63,67 persen. Rumah tangga lainnya, masih sewa (10,63 persen), menempati rumah orang tua/sanak/saudara (7,80 persen), rumah dinas (6,31 persen), dan 8,04 persen sisanya menempati rumah milik orang lain tetapi bebas sewa, mengontrak dan lain-lain.



**Gambar 6.1** Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Barat Tahun 2011



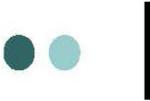
## Kualitas Perumahan

Kualitas perumahan layak huni di Provinsi Papua Barat meningkat. Berdasarkan empat indikator rumah layak huni pada tahun 2009–2011 menunjukkan adanya perbaikan kualitas perumahan di Provinsi Papua Barat. Persentase rumah tangga dengan lantai bukan tanah, atap layak, dan luas lantai per kapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> meningkat. Persentase rumah tangga dengan rumah berlantai bukan tanah meningkat dari 91,60 persen pada tahun 2009 menjadi 93,99 persen pada tahun 2011. Sebaliknya, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding terluas dari tembok (permanen) menurun. (Gambar 6.2).

**Gambar 6.2 Kondisi Perumahan Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009 – 2011**



Keterangan: \* Tidak Beratap Dedaunan

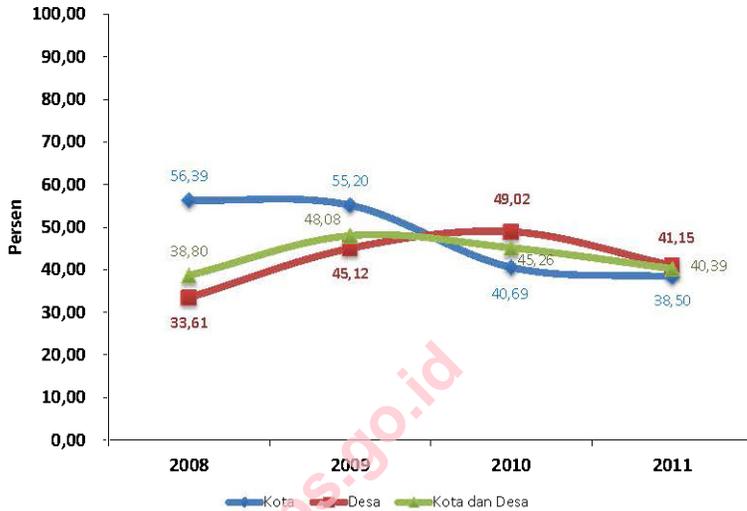


## Air Minum Layak

Sumber air minum digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air yang jaraknya ke tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase. Air kemasan dianggap sebagai sumber air minum layak hanya jika rumah tangga yang bersangkutan menggunakannya untuk memasak dan menjaga kebersihan tubuh, dan di Indonesia penggunaan air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak karena aspek keberlanjutannya.

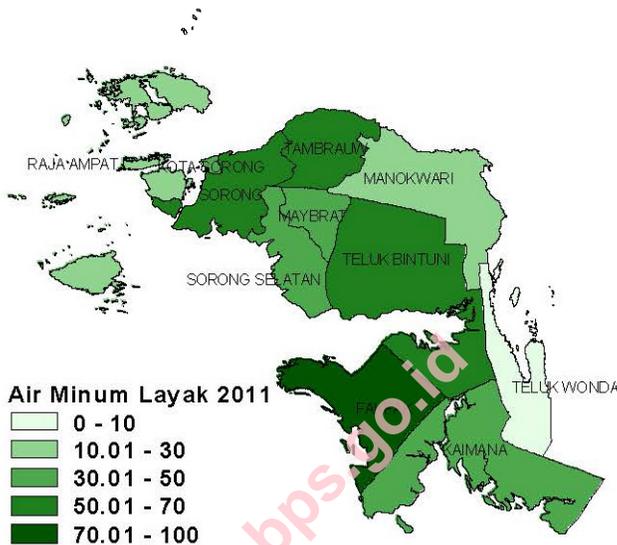
Gambar 6.3 menyajikan perkembangan akses rumah tangga terhadap air minum yang layak selama tahun 2008 hingga tahun 2011. Secara umum, akses rumah tangga terhadap air minum yang layak di provinsi Papua Barat mengalami peningkatan. Di satu sisi, akses terhadap air minum layak dari rumah tangga di perdesaan menunjukkan peningkatan tetapi kondisi di perkotaan berlaku sebaliknya. Pertumbuhan rumah



**Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008 – 2011**

tangga baru di daerah perkotaan belum sepenuhnya dapat diikuti dengan penyediaan kebutuhan air minum khususnya air minum yang layak. Hampir separuh rumah tangga di perkotaan (49,34 persen) menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum (BPS Provinsi Papua Barat, 2011).

Akses air minum layak antar kabupaten/kota berbeda. Gambar 6.4 memperlihatkan gradasi warna yang menyatakan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air bersih di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Tampak bahwa akses air minum layak di Kabupaten Teluk Wondama sangat rendah (kurang dari 10 persen). Sebaliknya, akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Fakfak masing-masing sebesar 69,22 persen dan 81,16 persen. Data akses air minum menurut kabupaten/kota selengkapnya disajikan pada Lampiran VI (2).



**Gambar 6.4** Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011

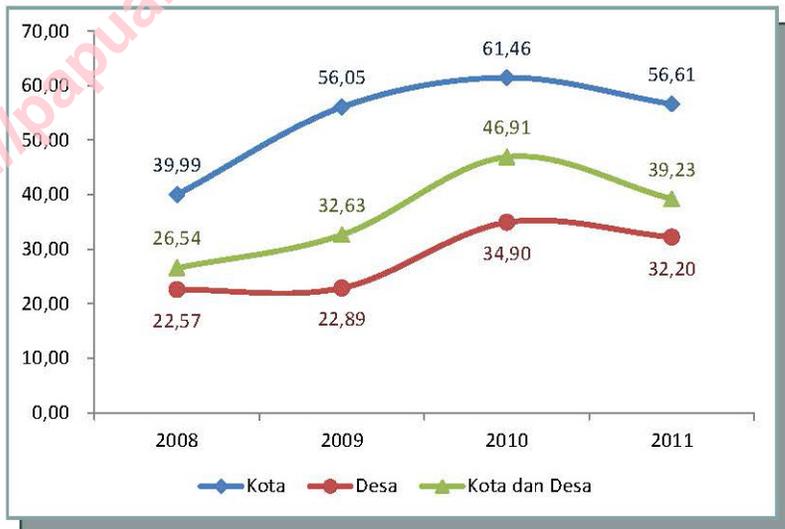
### Sanitasi Layak

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia (Bappenas, 2010). Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel

slab, wadah ember, dan toilet gantung.

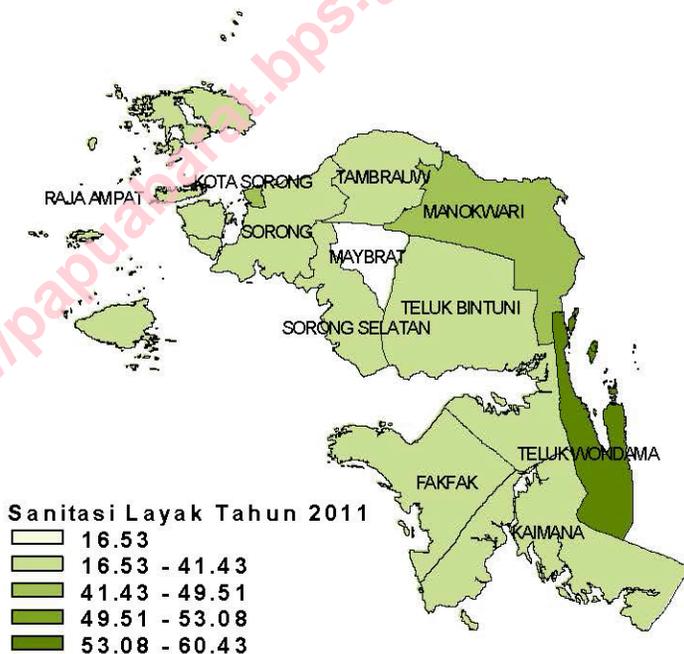
Perkembangan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Papua Barat mengalami peningkatan. Gambar 6.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2008–2011, peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perkotaan. Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di daerah perdesaan meningkat dari 22,57 persen pada tahun 2008 menjadi 32,20 persen pada tahun 2011. Demikian juga di daerah perkotaan, persentasenya meningkat dari 26,54 persen menjadi 39,23 persen pada periode yang sama. Gambar 6.5 juga menunjukkan adanya perbedaan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak antara

**Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Sanitasi yang Layak Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2008 - 2011**

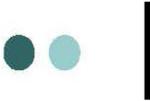


daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

Selain terdapat perbedaan akses terhadap sanitasi yang layak di daerah perkotaan dan perdesaan, perbedaan akses terhadap sanitasi yang layak juga berbeda antar kabupaten/kota. Gambar 6.6 memperlihatkan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2011. Tampak bahwa akses terhadap sanitasi yang layak terendah di Kabupaten Maybrat dan tertinggi di Kabupaten Teluk Wondama. Rendahnya sanitasi yang layak di Kabupaten Maybrat disebabkan karena separuh



**Gambar 6.6** Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat, Tahun 2011



dari jumlah rumah tangga di Maybrat (50,86 persen) menggunakan jenis kloset berupa plengsengan dan sebaliknya penggunaan kloset berjenis leher angsa hanya 30,86 persen.

### **Penerangan**

Kriteria selanjutnya yang digunakan dalam mengamati kondisi perumahan di Papua Barat adalah fasilitas penerangan. Penerangan menjadi sarana pendukung anggota rumah tangga dalam melakukan aktifitas sehari-hari di rumah. Pemakaian listrik sebagai sumber penerangan juga dapat menjadi indikasi besarnya akses rumah tangga terhadap informasi khususnya melalui media elektronik.

Sumber penerangan listrik di Papua Barat belum dapat sepenuhnya diusahakan oleh PLN. Akses listrik PLN terbanyak di Kota Sorong yaitu sebesar 91,75 persen. Sebaliknya, persentase rumah tangga pengguna listrik PLN di Kabupaten Teluk Wondama sangat rendah, hanya 5,96 persen. Secara umum, penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan khususnya di malam hari mengalami penurunan dari 66,11 persen pada tahun 2010 menjadi 62,10 persen pada tahun 2011 (Lampiran VI (3)). Untuk memenuhi kebutuhan penerangan listrik, di kabupaten tertentu seperti pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengusahakan pengadaan listrik sendiri yang dikelola oleh PLTD.



## Bab 7

# Sosial Lainnya

---

Bagian ini mengulas aspek sosial lain yang belum dibahas pada Bab 1 sampai dengan Bab 6. Pembahasan difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan dan akses penduduk terhadap perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi (ITK). Data penanggulangan kemiskinan yang dihimpun melalui pengumpulan data Susenas tahun 2011 meliputi pengurangan pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar yaitu biaya kesehatan dan pembelian beras miskin (raskin). Akses penduduk terhadap ITK meliputi penguasaan media komunikasi seperti telepon, komputer, dan handphone; dan akses penduduk terhadap media internet.

### **Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran. Pertama, mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatannya. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui program raskin, pembebasan biaya kesehatan dan dana BOS.

Tabel 7.1 memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat

**Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Program Penanggulangan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Gratis</b>	<b>Raskin</b>	<b>Kredit Usaha</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Fakfak	33.05	55.27	5.70
Kab. Kaimana	30.56	48.61	3.47
Kab. Teluk Wondama	71.31	61.75	9.96
Kab. Teluk Bintuni	47.46	28.36	10.75
Kab. Manokwari	18.78	41.84	5.31
Kab. Sorong Selatan	38.55	42.97	6.43
Kab. Sorong	38.00	80.05	6.65
Kab. Raja Ampat	51.19	79.66	2.71
Kab. Tambrauw	21.78	63.56	0.44
Kab. Maybrat	29.28	74.32	4.05
Kota Sorong	19.71	32.16	3.94
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>34.64</b>	<b>53.51</b>	<b>5.49</b>

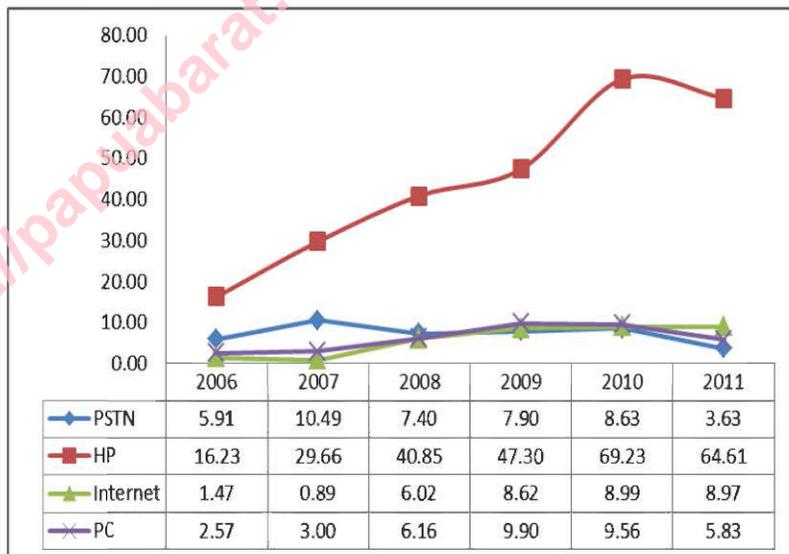
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2011)

tahun 2011. Akses tertinggi untuk pelayanan kesehatan gratis tercatat di Kabupaten Teluk Wondama (71,31 persen). Akses tertinggi untuk penyaluran beras miskin di Kabupaten Sorong (80,05 persen). Akses tertinggi untuk penyaluran kredit usaha di Kabupaten Teluk Bintuni (10,75 persen). Layanan kredit untuk usaha mikro merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan akses terendah dibandingkan program layanan kesehatan gratis dan beras miskin.

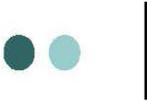
## Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi

Perkembangan akses teknologi komunikasi dan informasi di Papua Barat hingga tahun 2011 cukup pesat. Pengguna telepon selular atau HP di Provinsi Papua Barat sudah mencapai 64,61 persen. Persentase rumah tangga pengguna telepon selular tertinggi di Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Tambrau (Lampiran VII(2)). Hal ini dapat dimaklumi karena pembukaan jaringan telepon selular pertama di Papua Barat pertama kali di Kota Sorong. Sementara di Kabupaten Tambrau akses telepon selular masih terbatas karena kabupaten baru ini sangat terisolasi.

Pesatnya perkembangan telepon selular berdampak pada penurunan akses rumah tangga terhadap telepon (PSTN).



**Gambar 7.1** Persentase Rumah Tangga yang Memiliki PSTN, HP, PC dan Akses Internet di Provinsi Papua Barat Tahun 2006 - 2011



Persentase rumah tangga pengguna telepon di Papua Barat turun dari 8,63 persen pada tahun 2010 menjadi 3,63 persen pada tahun 2011. Sifatnya yang statis dan jaringan line telepon yang terbatas menyebabkan banyak rumah tangga yang enggan untuk memasang telepon di rumah.

Penguasaan media komputer baik berupa PC/Desktop ataupun laptop di Papua Barat masih sangat rendah. Meskipun persentase rumah tangga yang menguasai komputer meningkat tetapi besarnya kurang dari 10 persen. Persentase pengguna komputer PC berkurang sebaliknya pengguna laptop atau notebook meningkat (Lampiran VII(2)).

### **Akses Internet**

Perkembangan mutakhir teknologi internet mengakibatkan dunia seakan tidak lagi berjarak dan bersekat. Informasi dari belahan dunia manapun dengan sangat mudah diakses dengan layanan internet. Internet dapat diakses melalui line telepon, handphone dengan kabel atau tanpa kabel (wireless). Akses internet bisa di rumah, kantor, pusat perniagaan atau hotel.

Sejak tahun 2010, data akses internet tidak lagi ditanyakan di rumah tangga tetapi di tingkat individu. Dengan demikian, Susenas 2010 dapat menggambarkan persentase penduduk yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sebelum survei dilaksanakan. Lampiran VII (3) memperlihatkan bahwa persentase penduduk yang mengakses internet terbanyak di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong dan terendah di Kabupaten Tambrau.

# *Lampiran-Lampiran*

<http://papuabari.bps.go.id>

# I

## (1) Indikator Kependudukan

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2000–2011

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Per Tahun 2010 - 2011
	2000	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Fakfak	51.295	66.828	68.503	2,51
Kab. Kaimana	30.115	46.249	48.251	4,33
Kab. Teluk Wondama	18.522	26.321	27.233	3,46
Kab. Teluk Bintuni	37.172	52.422	54.194	3,38
Kab. Manokwari	127.622	187.726	194.948	3,85
Kab. Sorong Selatan	22.487	37.900	39.297	3,69
Kab. Sorong	62.909	70.619	73.088	3,50
Kab. Raja Empat	33.605	42.507	43.435	2,18
Kab. Tambrauw	5.917	6.144	6.147	0,05
Kab. Maybrat	20.245	33.081	34.287	3,65
Kota Sorong	119.800	190.625	199.630	4,72
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>529.689</b>	<b>760.422</b>	<b>789.013</b>	<b>3,76</b>

Sumber: BPS, Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010.

# I

## (2) Indikator Kependudukan

### Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008–2011

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	4,76	6,06	6,21
Kaimana	2,31	2,85	2,97
Teluk Wondama	1,94	6,65	6,88
Teluk Bintuni	2,99	2,52	2,60
Manokwari	12,24	13,17	13,68
Sorong Selatan	2,10	9,60	9,96
Sorong	3,94	9,52	9,86
Raja Empat	6,88	5,29	5,41
Tambrau		1,19	1,19
Maybrat		6,06	6,28
Kota Sorong	156,16	290,30	304,02
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>5,30</b>	<b>7,84</b>	<b>8,13</b>

Sumber: BPS, Provinsi Papua Barat Dalam Angka Tahun 1009–2011



## (1) Kesehatan

Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat Tahun 2009–2011.

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	70,16	70,52	70,88
Kaimana	69,48	69,65	69,88
Teluk Wondama	67,25	67,51	67,76
Teluk Bintuni	67,88	68,21	68,54
Manokwari	67,67	68,00	68,29
Sorong Selatan	66,49	66,66	66,82
Sorong	67,49	67,85	68,22
Raja Ampat	65,75	66,17	66,50
Tambrau	66,09	66,15	66,31
Maybrat	66,03	66,33	66,62
Kota Sorong	71,53	71,95	72,36
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>68,20</b>	<b>68,51</b>	<b>68,81</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2009–2011.

# II

## (2) Kesehatan

### Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran							
	Dokter	Bidan	Tenaga para-medis lain	Dukun	Famili/keluarga	Lainnya	TT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Kab. Fakfak	18,15	50,62	0,87	28,78	1,57	0,00	0,00	
Kab. Kaimana	6,88	58,99	5,95	26,71	1,47	0,00	0,00	
Kab. Teluk Wondama	2,11	30,17	6,88	26,43	33,36	1,06	0,00	
Kab. Teluk Bintuni	10,96	40,21	2,32	30,81	12,58	1,96	1,16	
Kab. Manokwari	29,05	41,36	3,87	7,69	15,97	2,06	0,00	
Kab. Sorong Selatan	7,09	29,84	21,41	31,00	10,65	0,00	0,00	
Kab. Sorong	12,17	48,22	0,51	25,82	13,28	0,00	0,00	
Kab. Raja Ampat	1,81	37,86	1,79	55,57	2,97	0,00	0,00	
Kab. Tambrauw	4,10	38,85	4,70	36,46	15,89	0,00	0,00	
Kab. Maybrat	1,80	27,10	30,40	30,45	10,25	0,00	0,00	
Kota Sorong	15,67	65,49	0,00	17,49	1,16	0,19	0,00	
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>14,95</b>	<b>48,15</b>	<b>4,21</b>	<b>22,76</b>	<b>9,13</b>	<b>0,71</b>	<b>0,09</b>	

Sumber: BPS, Susenas 2011



### (3) Kesehatan

Angka Kesakitan Penduduk di Provinsi Papua Barat,  
Tahun 2009–2011.

Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	11.61	7.96	10,57
Kaimana	10.03	11.12	11,50
Teluk Wondama	25.24	22.32	13,79
Teluk Bintuni	20.61	23.49	18,42
Manokwari	30.74	16.32	14,18
Sorong Selatan	18.60	18.63	12,75
Sorong	16.79	23.63	15,33
Raja Ampat	13.78	26.16	12,83
Tambrau		47.38	6,36
Maybrat		14.51	17,00
Kota Sorong	16.10	24.38	13,87
Provinsi Papua Barat	19.62	19.50	13,92

Sumber: BPS, Susenas 2009–2011



## (1) Pendidikan

**Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun atau Lebih di Provinsi Papua Barat, Tahun 2009–2011**

Kabupaten/ Kota	Angka Melek Huruf			Rata-rata Lama Sekolah		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	97,18	97,46	98,13	9,09	9,27	9,37
Kaimana	95,49	95,50	96,91	7,32	7,55	7,63
Teluk Wondama	83,13	84,05	84,18	6,44	6,61	6,69
Teluk Bintuni	82,98	85,90	87,05	6,88	6,90	6,91
Manokwari	85,67	87,79	88,77	7,95	8,37	8,43
Sorong Selatan	88,20	88,32	88,43	7,94	7,98	8,06
Sorong	91,40	91,69	91,76	8,04	8,06	8,09
Raja Ampat	92,77	93,62	94,13	7,26	7,35	7,43
Tambrauw	76,38	77,15	77,33	4,21	5,74	5,78
Maybrat	89,80	90,73	90,87	6,92	7,78	8,00
Kota Sorong	99,12	99,13	99,14	10,54	10,59	10,68
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>92,34</b>	<b>93,19</b>	<b>93,39</b>	<b>8,01</b>	<b>8,21</b>	<b>8,26</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, IPM Provinsi Papua Barat 2011.



## (2) Pendidikan

### Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Barat, 2010–2011

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Sekolah							
	7 - 12 Tahun		13 - 15 Tahun		16 - 18 Tahun		19 - 24 Tahun	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	93,42	98,32	90,45	95,42	55,09	81,8	18,49	23,15
Kaimana	95,80	96,47	76,19	86,82	44,30	50,09	3,48	0
Teluk Wondama	84,31	87,76	91,23	86,49	63,64	27,48	10,92	4,17
Teluk Bintuni	97,31	91,98	83,86	93,87	42,53	52,76	8,23	3,99
Manokwari	89,50	88,85	90,84	80,19	68,69	54,96	21,76	25,28
Sorong Selatan	89,17	91,81	70,61	85,46	43,09	64,09	7,36	12,19
Sorong	93,68	97,67	88,10	92,6	52,63	71,62	10,39	16,29
Raja Ampat	95,04	92,56	98,00	89,37	62,16	57,78	11,59	11,81
Tambrauw	90,96	88,78	91,84	84,12	58,97	78,4	13,33	10,64
Maybrat	N.a	99,51	83,67	100	77,94	68,72	10,00	3,87
Kota Sorong	98,54	98,94	98,55	90,89	55,00	78,07	14,04	23,03
<b>Papua Barat</b>	<b>94,04</b>	<b>94,38</b>	<b>89,95</b>	<b>88,59</b>	<b>58,98</b>	<b>65,40</b>	<b>14,45</b>	<b>18,31</b>

Sumber: BPS, Susenas 2010 dan 2011



### (3) Pendidikan

#### Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Barat, 2010—2011

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Murni							
	SD		SMP		SMA		PT	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	93,42	92,72	48,74	69,74	46,12	56,95	10,08	15,77
Kaimana	95,80	88,09	38,98	61,36	26,28	41,57	0,80	0,00
Teluk Wondama	83,66	86,77	56,14	22,99	25,00	12,49	3,36	0,00
Teluk Bintuni	97,31	85,45	41,51	52,36	19,87	36,77	3,00	0,47
Manokwari	88,44	83,72	55,34	52,48	51,26	40,00	11,69	22,04
Sorong Selatan	89,17	89,25	30,61	45,80	17,92	36,25	3,47	5,15
Sorong	93,68	92,14	47,62	61,12	42,11	53,45	1,30	10,50
Raja Ampat	95,04	86,97	42,00	38,54	21,62	32,77	N.a	2,02
Tambrauw	90,96	87,24	48,98	38,10	35,90	32,47	0,00	0,00
Maybrat	97,56	97,00	38,78	76,43	66,18	56,52	5,00	2,09
Kota Sorong	91,26	88,76	57,97	67,17	50,00	61,04	9,59	18,35
<b>Papua Barat</b>	<b>91,91</b>	<b>88,28</b>	<b>49,65</b>	<b>57,66</b>	<b>43,93</b>	<b>47,88</b>	<b>7,36</b>	<b>13,86</b>

Sumber: BPS, Susenas 2010 dan 2011



## (1) Taraf dan Pola Konsumsi

### Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2009 dan 2010

Kabupaten/ Kota	Kemiskinan Tahun 2009			Kemiskinan Tahun 2010		
	GK Rp./kap/bln	P0 (%)	Penduduk Miskin (000)	GK Rp./kap/bln	P0 (%)	Penduduk Miskin (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	289.107	35,29	23,40	320.919	33,09	22,30
Kaimana	226.850	23,51	9,80	251.812	20,79	9,70
Teluk Wondama	296.732	48,47	11,12	329.383	44,30	11,70
Teluk Bintuni	350.817	51,91	28,21	389.419	47,62	25,00
Manokwari	341.271	40,80	70,24	378.823	37,28	70,30
Sorong Selatan	209.315	26,76	16,31	227.823	28,02	10,60
Sorong	223.625	34,45	33,44	243.554	32,58	22,90
Raja Ampat	221.776	23,71	9,66	241.540	23,62	10,00
Tambrau				245.060	44,88	2,80
Maybrat				248.702	40,17	13,60
Kota Sorong	402.953	15,12	25,40	438.863	14,03	26,90

Sumber: BPS, Susenas 2009 dan 2010



## (2) Taraf dan Pola Konsumsi

### Garis Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007–2011

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b><u>Perkotaan</u></b>			
Maret 2007	154.698	54.820	209.518
Maret 2008	180.866	63.941	244.807
Maret 2009	223.357	81.373	304.730
Maret 2010	233.764	85.406	319.170
Maret 2011	251.752	90.958	342.709
<b><u>Perdesaan</u></b>			
Maret 2007	176.025	28.933	204.958
Maret 2008	197.785	32.469	230.254
Maret 2009	223.592	45.762	269.354
Maret 2010	238.145	49.367	287.512
Maret 2011	255.647	56.090	311.737
<b><u>Kota+Desa</u></b>			
Maret 2007	172.145	33.853	205.998
Maret 2008	193.930	39.641	233.570
Maret 2009	223.538	53.878	277.416
Maret 2010	237.147	57.580	294.727
Maret 2011	254.759	64.036	318.796

Sumber: BPS, Susenas Panel 2007 - 2011

**Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2007–2011**

Daerah/Tahun	Kota	Desa	Kota dan Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
<b><u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</u></b>			
Maret 2007	0,73	16,58	12,97
Maret 2008	0,73	11,67	9,18
Maret 2009	0,43	12,51	9,75
Maret 2010	1,14	13,22	10,47
Maret 2011	0,80	11,13	8,78
<b><u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</u></b>			
Maret 2007	0,12	7,29	5,66
Maret 2008	0,24	4,46	3,50
Maret 2009	0,04	4,61	3,57
Maret 2010	0,36	5,47	4,30
Maret 2011	0,14	4,40	3,43

Sumber: BPS, Susenas Panel 2007 - 2011



#### (4) Taraf dan Pola Konsumsi

##### Kemampuan Daya Beli Masyarakat di Papua Barat, 2009–2011

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP)		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	585,63	589,06	592,30
Kaimana	599,40	600,31	601,27
Teluk Wondama	600,79	601,00	601,97
Teluk Bintuni	597,49	598,46	600,33
Manokwari	588,11	588,30	589,12
Sorong Selatan	587,90	588,85	590,23
Sorong	597,45	598,18	600,62
Reja Ampat	560,49	560,70	562,22
Tambrau	440,53	441,15	443,07
Maybrat	580,93	582,12	583,20
Kota Sorong	634,63	635,48	638,70
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>595,28</b>	<b>596,08</b>	<b>599,28</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009 - 2011

# VI

## (1) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Perumahan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010–2011

Kabupaten/kota	Lantai Bukan Tanah		Atap Layak		Dinding Permanen	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Fakfak	97,13	98,91	100,00	100,00	85,33	78,52
Kab. Kaimana	89,55	91,32	99,31	99,37	70,01	57,73
Kab. Teluk Wondama	96,69	92,02	84,30	86,85	29,75	11,15
Kab. Teluk Bintuni	95,46	97,58	89,64	98,98	9,02	12,63
Kab. Manokwari	93,13	95,98	97,32	99,12	54,72	51,86
Kab. Sorong Selatan	91,10	77,21	55,95	67,52	27,62	36,94
Kab. Sorong	84,21	87,68	97,89	92,86	50,53	50,13
Kab. Raja Ampat	88,14	92,24	90,96	86,45	43,50	37,68
Kab. Tambrau	64,92	76,88	76,44	80,47	42,41	32,52
Kab. Maybrat	93,90	94,96	97,56	96,92	48,17	57,16
Kota Sorong	96,71	96,31	99,10	99,14	75,45	73,25
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>93,02</b>	<b>93,99</b>	<b>94,85</b>	<b>95,89</b>	<b>56,68</b>	<b>54,12</b>

Sumber: BPS, Susenas 2010 dan 2011

# VI

## (2) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah Tangga yang Meangakses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010–2011

Kabupaten/kota	Air Minum Layak		Sanitasi Layak	
	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Fakfak	83,25	81,16	46,38	26,35
Kab. Kaimana	40,51	35,36	34,06	35,26
Kab. Teluk Wondama	23,14	9,17	64,05	54,99
Kab. Teluk Bintuni	48,87	55,35	42,10	35,3
Kab. Manokwari	35,51	29,43	54,96	49,14
Kab. Sorong Selatan	60,53	37,07	25,40	22,53
Kab. Sorong	77,89	69,22	40,53	41,01
Kab. Raja Ampat	26,55	23,17	36,16	26,36
Kab. Tambrauw	55,50	50,65	27,75	30,22
Kab. Maybrat	49,39	35,66	20,73	9,99
Kota Sorong	33,83	32,26	55,39	44,37
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>45,26</b>	<b>40,39</b>	<b>46,91</b>	<b>39,23</b>

Sumber: BPS, Susenas 2010 dan 2011

# VI

## (3) Perumahan dan Lingkungan

Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Papua Barat, Tahun 2010–2011

Kabupaten/kota	Listrik PLN		Listrik Non PLN	
	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab. Fakfak	69,93	66,68	11,08	19,50
Kab. Kaimana	48,49	54,37	38,29	15,73
Kab. Teluk Wondama	47,93	5,96	24,79	27,50
Kab. Teluk Bintuni	47,49	41,74	33,90	37,39
Kab. Manokwari	79,57	71,57	4,78	7,77
Kab. Sorong Selatan	28,25	19,37	18,39	20,42
Kab. Sorong	78,95	71,24	15,26	11,69
Kab. Raja Ampat	7,91	9,23	53,11	49,91
Kab. Tambrauw	38,22	10,25	19,90	32,81
Kab. Maybrat	43,29	18,32	3,66	28,50
Kota Sorong	83,53	91,75	11,38	6,42
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>66,11</b>	<b>62,10</b>	<b>16,06</b>	<b>16,09</b>

Sumber: BPS, Susenas 2010 dan 2011

# VII

## (1) Sosial Lainnya

### Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Alat Komunikasi Informasi dan Teknologi di Provinsi Papua Barat Tahun 2010–2011

Kabupaten/Kota	Telepon Rumah		Handphone		Destop/PC		Laptop/ notebook	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kab. Fakfak	23,46	5,15	59,80	66,39	7,85	4,39	12,83	8,92
Kab. Kaimana	1,65	2,50	51,20	55,23	3,70	4,63	6,68	9,14
Kab. Teluk Wondama	0,00	0,00	54,96	18,33	4,55	0,00	12,40	0,39
Kab. Teluk Bintuni	3,20	2,58	70,31	60,79	5,34	1,79	11,58	14,27
Kab. Manokwari	9,64	5,03	80,96	70,16	12,01	8,93	15,49	14,48
Kab. Sorong Selatan	0,00	0,81	27,71	27,05	1,81	2,44	5,99	8,91
Kab. Sorong	0,53	0,55	68,95	72,25	4,74	3,69	5,26	6,41
Kab. Raja Ampat	0,00	0,00	44,07	27,19	2,26	1,03	5,65	3,06
Kab. Tambrauw	0,00	0,00	0,52	0,89	0,52	0,00	0,52	0,00
Kab. Maybrat	0,00	0,00	3,66	5,39	0,61	0,00	1,83	0,00
Kota Sorong	14,07	5,95	88,92	93,00	15,57	9,22	14,37	17,67
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>8,35</b>	<b>3,63</b>	<b>67,76</b>	<b>64,61</b>	<b>8,99</b>	<b>5,83</b>	<b>11,36</b>	<b>11,55</b>

Sumber: BPS, Susenas 2010 dan 2011

# VII

## (2) Sosial Lainnya

### Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Provinsi Papua Barat Tahun 2011

Kabupaten/Kota	% Penduduk Yang Mengakses Internet	Tempat Mengakses Internet				
		Rumah	Warnet	Kantor	Sekolah	Hand- phone
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab. Fakfak	6,21	18,94	22,49	8,04	5,94	68,15
Kab. Kaimana	3,35	31,55	43,68	16,44	10,19	84,64
Kab. Teluk Wondama	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Kab. Teluk Bintuni	7,87	5,29	10,06	8,31	9,04	91,34
Kab. Manokwari	11,27	33,94	27,29	17,63	10,94	62,92
Kab. Sorong Selatan	4,83	12,02	40,23	39,46	2,00	81,83
Kab. Sorong	5,86	16,89	28,62	12,77	10,46	52,96
Kab. Raja Ampat	1,54	0,00	17,38	35,25	5,96	64,60
Kab. Tambrauw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kab. Maybrat	0,89	0,00	26,41	6,39	0,00	46,71
Kota Sorong	20,55	10,05	32,73	11,13	4,64	73,17
<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>10,13</b>	<b>17,69</b>	<b>29,49</b>	<b>13,66</b>	<b>7,06</b>	<b>70,15</b>

Sumber: BPS, Susenas 2011

# DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://papuabarar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT**

Jln. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315

E-mail : [bps9100@mailhost.bps.go.id](mailto:bps9100@mailhost.bps.go.id)

Homepage : [www.irjabar.bps.go.id](http://www.irjabar.bps.go.id)



9 772089 165000